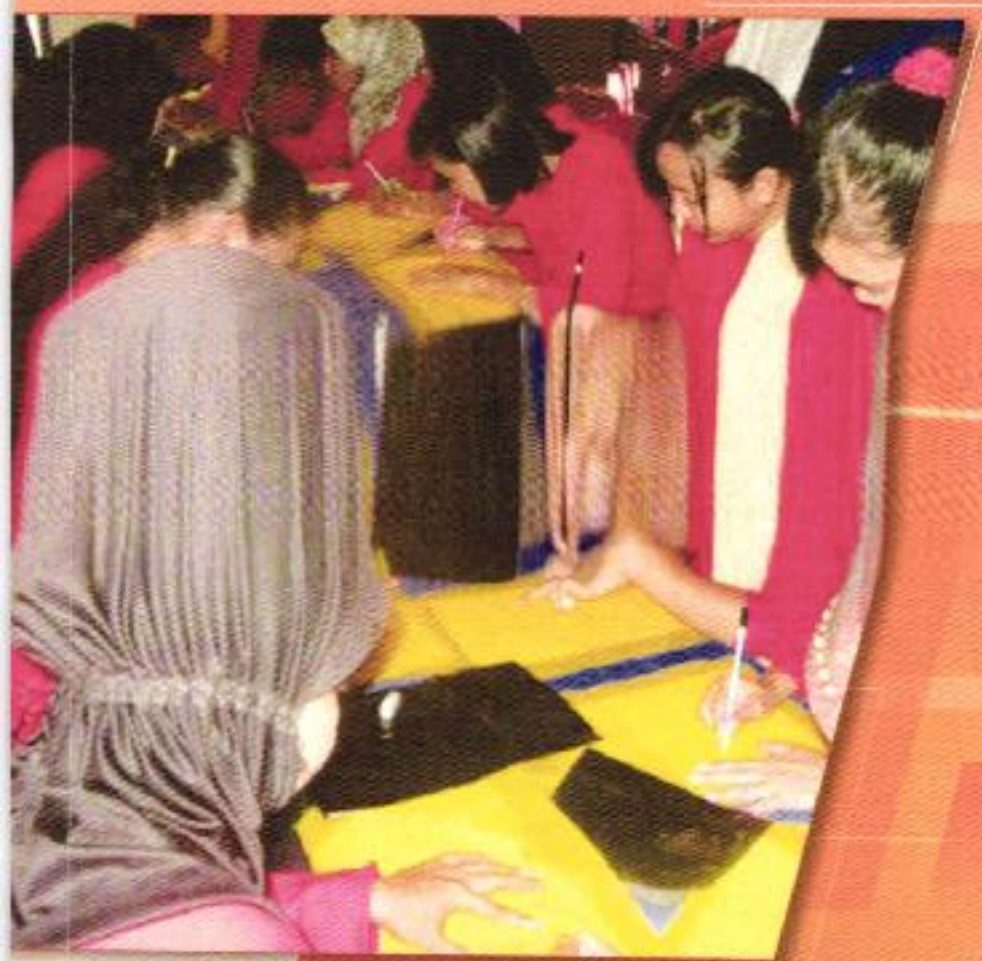


1

Pendidikan Masyarakat



Wiwin Yulianingsih, M.Pd.
Dr. Gunarti Dwi Lestari, M.Si., M.Pd.



Lahir di Tuban, 27 Juli 1979. Sejak usia 6 tahun menetap di Kabupaten Lamongan, menyelesaikan pendidikan mulai dari SD – SMA di Lamongan Jawa Timur, S.1 di Jurusan PLS FIP Unesa pada tahun 1999 dan melanjutkan S.2 pada tahun 2002 Program PLS Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Pekerjaan pertama adalah sebagai pembimbing di Komunitas Belajar Anak Jalanan Sanggar Alang-Alang Surabaya selama 3 tahun sekaligus menjadi Tenaga Lapangan Dikmas di UPTD BPS Kecamatan Bubutan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Diangkat menjadi Dosen PLS FIP Unesa mulai tahun 2006 sampai sekarang. Mengajar mata kuliah Pendidikan Masyarakat, Konsep Dasar PLS, Media Pembelajaran PLS, PPL, PKL, KKN, Patologi Sosial, Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar serta mata kuliah yang lain. Sebagai tim penilai program Pendidikan Keaksaraan Fungsional di Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur mulai tahun 2005 – sekarang. Melakukan kajian-kajian tentang ke PLS an, UKM di Kabupaten Lamongan, TBM, PKBM dan Pemberdayaan Perempuan di Desa Lab Site serta memiliki program belajar otomatis untuk pembantu rumah tangga.



Lahir di Semarang 12 Juli 1961, menyelesaikan pendidikan S1 tahun 1985 di IKIP Semarang, S2 di Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian mendapatkan gelar doktor di Universitas Negeri Malang. Telah menulis berbagai makalah dan buku antara lain: Media Pembelajaran, Metode Pembelajaran PLS, Sosiologi Pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Taman Bacaan Kreatif, menulis makalah bak untuk kegiatan seminar,

workshop maupun tulisan yang diterbitkan oleh jurnal Nasional

tentang PAUD, Kesetaraan, Keaksaraan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Taman Bacaan Kreatif dan Rintisan Balai Belajar Bersama (RBB), membantu Direktorat Pembinaan PAUD dan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menulis berbagai Bahan Ajar PAUD untuk Pendidik PAUD dan berbagai Pedoman/Juknis. Melakukan berbagai penelitian kajian tentang Rintisan Balai Belajar Bersama, Taman Bacaan Masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Bimbingan teknis bagi Penyelenggara Keaksaraan Fungsional, penulis juga melakukan berbagai kegiatan Pengabdian Masyarakat melalui pendampingan RBS, PKBM, Rumah Pintar, Mobil Pintar, Motor Pintar, Kuliah Kerja Nyala Tematik KKN Posdaya, Pemberdayaan Perempuan dll. Penulis juga merupakan Master Trainer Tingkat Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yang tergabung dalam Tim NEST (*Nasional Early Childhood Specialist Team*) yang memperoleh berbagai kesempatan untuk mengikuti Short Course PAUD di dalam dan di Luar Negeri mulai tahun 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013. Penulis juga berpengalaman sebagai tim penilai program Pendidikan Kecakapan Hidup /PKHL/le Skill melalui dana hibragrant Direktorat Pembinaan Kursus DIRJEN PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2003-2010, serta Juri untuk kegiatan apresiasi terhadap PTK-PNF.



Universitas Negeri Surabaya
UNIVERSITY PRESS

ISBN : 978-602-449-032-4



978-602-449-032-4

1

PENDIDIKAN MASYARAKAT

(EDISI REVISI)

Wiwini Yulianingsih, M.Pd.

Dr. Gunarti Dwi Lestari, M.Si. M.Pd.



Penerbit
Unesa University Press

WiwinYulianingsih, M.Pd.

Dr.Gunarti Dwi Lestari, M.Si.M.Pd.

PENDIDIKAN MASYARAKAT

(EDISI REVISI)

Diterbitkan Oleh

UNESA UNIVERSITY PRESS

Anggota IKAPI No. 060/JTI/97

Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015

Kampus Unesa Ketintang

Gedung C-15 Surabaya

Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109

Fax. 031 – 8288598

Email: unipress@unesa.ac.id

unipressunesa@yahoo.com

vi, 203 hal., Illus, 15 x 21

ISBN: 978-602-449-031-7

copyright © 2017, Unesa University Press

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, fotoprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga buku "*Edisi Revisi Pendidikan Masyarakat*" dapat diselesaikan. Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta sahabat, keluarga dan pengikut beliau hingga akhir jaman.

Buku pendidikan masyarakat pertama dicetak pada tahun 2013. Mengalami beberapa perubahan tahun 2016. Adapun buku Pendidikan Masyarakat (Dikmas) ini memuat tentang Istilah pendidikan masyarakat, kebutuhan belajar, Asumsi-asumsi dasar, sejarah pendidikan masyarakat, mengapa pendidikan penting, pemikiran tokoh-tokoh tentang PNFI, perkembangan pendidikan masyarakat, program pendidikan masyarakat, PKBM dan Kominkan serta masyarakat belajar.

Pemahaman pendidikan masyarakat sangat penting untuk dikaji oleh mahasiswa maupun para praktisi bidang PLS baik secara teori maupun praktis. Seperti yang diketahui bahwa keberlangsungan pendidikan itu sejak adanya manusia. Begitu juga pendidikan masyarakat yang akan selalu ada berlangsung terus menerus karena terdapatnya *community*, baik berlangsung secara informal maupun non formal. Untuk itu, kami sangat berharap buku *Edisi Revisi Pendidikan Masyarakat* dapat diterima oleh para pembaca khususnya mahasiswa jurusan PLS serta para praktisi PLS, seraya tetap memberikan kritik dan tegur sapa sifatnya konstruktif demi penyempurnaan buku ini dimasa mendatang.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan inspirasi dan motivasi baik berbentuk saran pemikiran maupun semangat, sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Amiin.

Surabaya, 27 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Istilah Pendidikan Masyarakat	1
B. Kebutuhan Belajar	5
C. Asumsi-asumsi Dasar	13
D. Sejarah Pendidikan Masyarakat	15
E. Mengapa Pendidikan Penting	32
F. Pemikiran Tokoh-tokoh Tentang Pendidikan NonFormal-Informal	40
BAB II PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	54
A. Bentuk-bentuk layanan Direktorat Pendidikan Masyarakat	54
B. Sasaran Pendidikan Masyarakat	71
BAB III PROGRAM PENDIDIKAN MASYARAKAT	84
A. Komponen Kegiatan Belajar	84
B. Pendidikan Non Formal Sebagai jalan Menuju Masyarakat Gemar Belajar	86
C. Sepuluh Patokan pendidikan Masyarakat	90
D. Satuan Pendidikan Masyarakat	99

BAB IV	PKBM DAN KOMINKAN	125
	A. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	125
	B. Program Kominkan di Jepang	154
BAB V	MASYARAKAT PEMBELAJAR	165
	A. Pendidikan Sepanjang Hayat	166
	B. Definisi Pendidikan Sepanjang Hayat	167
	C. Pilar Pendidikan Sepanjang Hayat	169
	D. Karakteristik Masyarakat Pembelajar	171
	E. Pembelajar Orang Dewasa	177
	F. Asumsi Pokok Konsep Pendidikan Orang Dewasa	185
	DAFTAR PUSTAKA	201

BAB I PENDAHULUAN

A. Istilah Pendidikan Masyarakat

Dewasa ini pendidikan untuk masyarakat yang dilakukan diluar pengajaran sekolah biasa telah menunjukkan suatu segi baru dalam perkembangan pendidikan pada umumnya. Pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat telah dirasakan pula diberbagai belahan dunia. Juga di Indonesia, gerakan usaha dalam lapangan ini lazim disebut "Pendidikan Masyarakat". Telah banyak kita jumpai berbagai literatur terutama yang berasal dari manca negara, bermacam-macam istilah bagi usaha pendidikan diluar pengajaran sekolah biasa. Pendidikan Masyarakat banyak diistilahkan dengan '*Fundamental Education*', '*Adult Education*' dan '*Mass Education*'. Oleh karena istilah 'Pendidikan Masyarakat' ini lahir di Indonesia dan digunakan untuk mengartikan usaha-usaha pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan itu, serta sifat-sifatnya yang khas pula di Indonesia, maka wajib pula untuk membahasnya lebih mendalam.

Pendidikan Masyarakat mempunyai makna yang luas, namun yang dituju oleh Pendidikan Masyarakat adalah masyarakat orang dewasa termasuk pemuda diluar batas umur tertinggi kewajiban belajar dan dilakukan diluar lingkungan dan sistem pengajaran-pengajaran sekolah. Secara konsep, Pendidikan Masyarakat adalah masyarakat memberi kesempatan kepada tiap-tiap individu untuk mengembangkan bakatnya, guna disumbangkan kembali kepada masyarakatnya. Pendidikan

Masyarakat didasarkan pada prinsip pendidikan seumur hidup, dimana pendidikan dapat berlangsung dimanapun, kapanpun, untuk dan oleh siapapun. Penggunaan prinsip tersebut membuka kesempatan pada siapapun untuk mendapatkan layanan pendidikan.

Pendidikan masyarakat adalah usaha untuk membantu proses perkembangan sosial atau menuju kemandirian sosial yaitu kenaikan taraf hidup dalam kondisi yang tentram dan adil (Santoso, 2010:8). Pendidikan ini dilaksanakan di Indonesia oleh Departemen pendidikan dan kebudayaan (sekarang kementerian pendidikan dan kebudayaan) sejak tahun 1929 melalui bagian Pendidikan masyarakat mengalami perubahan didalam program-programnya sesuai kebutuhan masyarakat sehingga pendidikan masyarakat berkembang pesat dan terarah.

Pendidikan Masyarakat merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional Indonesia memiliki 3 (tiga) jalur, yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan In-Formal dan Pendidikan Non-Formal. Pendidikan Formal menunjuk pada Pendidikan Sistem Persekolahan, terstandarisasi sedemikian rupa dan mempunyai wujud legalitas-formal. Pendidikan Formal terstandar dalam hal jenjang-jenjangnya (Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi), lama belajarnya, paket kurikulumnya, evaluasinya dan lain-lain. Dapat dikatakan Pendidikan Formal lebih bersifat formalistis dan terikat pada legalitas formal-administratif. Pendidikan In-Formal sama sekali tidak terorganisasi secara struktural, tidak terdapat penjenjangan kronologis, lebih merupakan hasil pengalaman belajar individual-mandiri, dan pendidikannya tidak terjadi dalam medan interaksi belajar mengajar buatan sebagaimana pada Pendidikan Formal dan

Non-Formal. Pendidikan In-Formal meliputi pendidikan yang terjadi akibat wajar dari fungsi keluarga, pendidikan melalui media komunikasi massa, pendidikan melalui kelompok-kelompok organisasi, dan lain-lain. Pendidikan Non-Formal atau pendidikan luar sekolah, merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk melayani masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak terjangkau atau tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Pendidikan ini biasanya diartikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang terorganisir di luar sistem persekolahan, isi pendidikannya terprogram, adanya sekuensi materi yang disampaikan di dalam proses pendidikan yang berlangsung, dan proses pendidikannya berlangsung dalam medan interaksi belajar-mengajar. Sedangkan istilah yang sudah lama dikenal dan digunakan secara luas di Indonesia berhubungan dengan Pendidikan Non-Formal adalah Pendidikan Masyarakat. Belakangan ini, Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional juga menampilkan suatu konsepsi tentang Pendidikan Kemasyarakatan. Pendidikan Masyarakat juga dikenal sebagai Pendidikan Berbasis Masyarakat atau Belajar Masyarakat dan Pengembangan.

Istilah-istilah seperti pendidikan masyarakat, pembangunan masyarakat, dan pekerjaan sosial merupakan istilah-istilah yang digunakan di Indonesia dan implementasinya dibentuk departemen dan dinas yang bertugas melaksanakan pendidikan masyarakat. Kegiatan pendidikan yang dilakukan departemen dinas tersebut telah mengalami perkembangan masyarakat itu sendiri dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbagai bentuk pendidikan seperti diuraikan diatas, memberikan kesempatan kepada setiap individu anggota

masyarakat untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pendidikan yang dimaksud didapat menggunakan sistem sekolah maupun sistem luar sekolah (termasuk pelatihan) yang dapat memberikan pengetahuan, sikap dan kecakapan untuk kehidupan individu dalam masyarakat. Oleh karena itu pendidikan dalam arti luas (dalam bentuk apapun dan menggunakan sistem apapun) sangat diperlukan oleh setiap manusia, karena:

1. *Education was seen something different from training, but in a whole where practical knowledge is important and where theory was given by education* (Pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang berbeda dari pelatihan, tetapi didalam dunia pengetahuan praktik adalah penting dan dimana teori diberikan dengan pendidikan).
2. *Education is about the provision of learning opportunities to group of people* (Pendidikan adalah tentang wilayah kesempatan pembelajaran kepada kelompok orang-orang). (Jarvis P, 2007, dalam Santoso 2010: 19). Kesempatan pembelajaran yang diberikan pendidikan kepada setiap orang sebagai warga masyarakat, membuka kecenderungan kepada masyarakat secara keseluruhan untuk pembelajaran setiap saat. Kecenderungan inilah yang memunculkan istilah masyarakat pembelajaran (*Learning Society*) yakni :
“...*is one where the right to learn is protected and everyone can continue learning for whatever seasons they choose by various means, what about resources and complete flexibility*”. (Hatton, H J, 1997: 45, dalam Santoso: 19). *Learning society* inilah yang membawa masyarakat tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan jaman khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keberadaan Pendidikan Masyarakat di Indonesia dimulai sejak permulaan Indonesia merdeka dan terus berkembang hingga saat ini. Pada tahun 1949 Pemerintah membentuk lembaga yang menangani pendidikan masyarakat yang diberi nama Jawatan Pendidikan Masyarakat dibawah naungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Sekarang bagian Pendidikan Masyarakat ditangani oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen Paudni) yang didalamnya terdapat Direktorat Masyarakat (Dikmas).

Pada dasarnya usaha-usaha untuk melahirkan Pendidikan Masyarakat oleh Jawatan Pendidikan adalah masalah kemelaratan dan kesengsaraan, masalah-masalah tersebut disebabkan karena:

1. Perkembangan dan penggunaan ilmu pengetahuan yang tidak seimbang dengan hasil-hasilnya diberbagai tempat dan bagian-bagian tertentu di dunia ini. Hal ini menyebabkan adanya daerah-daerah kantong yang masih terbelakang ditengah-tengah kemajuan jaman.
2. Ilmu pengetahuan dan hasil-hasilnya tidak dipergunakan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia tetapi justru untuk menindas komunitas lain.

B. Kebutuhan Belajar

Kebutuhan yang berkaitan dengan upaya manusia untuk mempertakankan dan mengembangkan kehidupannya disebut kebutuhan hidup manusia. Adapun hierarki kebutuhan Maslow sebagai berikut:

1. *Basic needs* atau kebutuhan dasar merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Dominasi kebutuhan fisiologis

ini relatif lebih tinggi dibanding dengan kebutuhan manusia lain dan dengan demikian muncul kebutuhan-kebutuhan lain.

2. *Safety needs* atau kebutuhan akan keselamatan, merupakan kebutuhan meliputi keamanan, kemantapan, ketergantungan, kebebasan dari rasa takut, cemas dan kekalauan pada diri, pelindung dan sebagainya.
3. *Love needs* atau kebutuhan rasa memiliki dan rasa cinta merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keselamatan telah terpenuhi. Artinya orang dalam kehidupannya akan membutuhkan rasa sayang dan menyayangi antar sesama dan untuk berkumpul dengan orang lain.
4. *Esteem needs* atau kebutuhan akan harga diri, semua orang dalam masyarakat mempunyai kebutuhan atau menginginkan penilaian terhadap dirinya yang mantap, mempunyai dasar yang kuat yang biasanya bermutu tinggi akan rasa hormat atau harga diri dan penghargaan dari orang lain. Kebutuhan ini dibagi dalam dua peringkat, yaitu :
 - a. Keinginan akan kekuatan , akan prestasi, berkecukupan, unggul dan kemampuan , percaya pada diri sendiri, kemerdekaan dan kebebasan.
 - b. Hasrat akan nama baik atau gengsi dan harga diri, prestise (penghormatan dan penghargaan diri dari orang lain), status, ketenaran dan kemuliaan, dominasi, pengakuan , perhatian dan martabat.
5. *Self actualitation needs* atau kebutuhan akan perwujudan diri, yakni kecenderungan untuk mewujudkan dirinya sesuai dengan kemampuannya (Maslow, 1998:39).

Azas Pendidikan Non-Formal meliputi azas kebutuhan belajar yakni : "...suatu jarak antara tingkat pengetahuan, keterampilan dan atau sikap yang dimiliki pada suatu saat dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan atau sikap yang ingin diperoleh seseorang, kelompok, lembaga, dan atau masyarakat yang hanya dapat dicapai melalui kegiatan pembelajaran. (Sudjana D, 2004, dalam Santoso, 2010:166)

Kebutuhan belajar yang dirasakan sama oleh setiap individu dalam suatu kelompok disebut kebutuhan belajar kelompok yang pada umumnya dapat dipenuhi melalui kegiatan belajar bersama atau kegiatan belajar kelompok. Dan belajar kelompok: "... is a group whose purpose is to ensure that group members learn specific subject matter, information, knowledge, skills, and procedures. Learning is the primary purpose of the group" (...adalah satu kelompok yang bertujuan untuk menjamin bahwa anggota-anggota kelompok belajar bahan belajar, informasi, pengetahuan, keterampilan dan prosedur khusus. Pembelajaran adalah tujuan utama dari kelompok).

Johnstone dan Rivera (Santoso, 2010: 166), mengklasifikasikan kebutuhan pembelajaran sebagai berikut:

- a. Kebutuhan belajar yang berkaitan dengan tugas pekerjaan.
 - 1) Peningkatan keterampilan untuk melaksanakan tugas profesional.
 - 2) Keterampilan untuk melakukan pelatihan dan pembelajaran.
 - 3) Pengetahuan dan keterampilan manajerial/ administrasi perusahaan.
 - 4) Keterampilan menggunakan teknik advertensi dan pemasaran.

- 5) Pengetahuan dan keterampilan manajemen perkantoran.
 - 6) Keterampilan dan menggunakan alat-alat kerja.
 - 7) Keterampilan untuk membuat dan memelihara alat perlengkapan kerja.
 - 8) Keterampilan untuk membantu dan melayani orang lain, staf dan pekerja.
- b. Kebutuhan belajar yang berhubungan dengan kegemaran dan rekreasi.
- 1) Keterampilan olahraga.
 - 2) Keterampilan membuat dekorasi.
 - 3) Keterampilan tari-menari.
 - 4) Keterampilan permainan.
 - 5) Keterampilan menggunakan alat musik.
 - 6) Keterampilan pentas.
 - 7) Keterampilan melukis dan memahat.
 - 8) Keterampilan rekreasi lainnya.
- c. Kebutuhan belajar yang berkaitan dengan keagamaan.
- 1) Peningkatan pengetahuan tentang agama yang dianut dan cara pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari.
 - 2) Peningkatan kesadaran dan sikap beragama.
 - 3) Peningkatan dan perluasan pemahaman tentang agama termasuk akhlak.
 - 4) Pengetahuan dan keterampilan tentang cara-cara untuk mempelajari dan menjelaskan agama.
- d. Kebutuhan belajar yang berhubungan dengan penguasaan bahasa dan pengetahuan umum
- 1) Pengetahuan dan keterampilan berbahasa asing.
 - 2) Pengetahuan dan keterampilan tentang kesusasteraan.
 - 3) Pengetahuan dan keterampilan tentang sejarah.

- c. Kebutuhan belajar yang berkaitan dengan kerumah-tangga.
 - 1) Keterampilan tata busana.
 - 2) Keterampilan tata boga.
 - 3) Keterampilan meningkatkan pendapatan keluarga.
 - 4) Keterampilan membina keluarga sehat.
 - 5) Keterampilan memelihara bayi dan anak.
 - 6) Keterampilan memelihara tanaman halaman.
 - 7) Keterampilan mengatur dan memelihara tanaman.
 - 8) Keterampilan tata graha.
- f. Kebutuhan belajar yang berkaitan dengan penampilan diri.
 - 1) Keterampilan memelihara kesegaran jasmani.
 - 2) Keterampilan membaca cepat.
 - 3) Keterampilan belajar secara efektif.
 - 4) Keterampilan berbicara didepan umum.
 - 5) Keterampilan berkomunikasi secara efektif.
 - 6) Keterampilan bergaul dimasyarakat.
 - 7) Keterampilan merias diri.
 - 8) Keterampilan sosial lainnya.
- g. Kebutuhan belajar yang berhubungan dengan pengetahuan tentang peristiwa baru.
 - 1) Pengetahuan tentang peristiwa dalam negeri.
 - 2) Pengetahuan tentang peristiwa diluar negeri.
 - 3) Pengetahuan tentang berbagai aliran politik.
 - 4) Pengetahuan tentang cara menjadi warga negara yang baik.
 - 5) Pengetahuan tentang informasi kontemporer.
- h. Kebutuhan belajar yang berhubungan dengan usaha dibidang pertanian.

- 1) Keterampilan mengolah tanah, memilih bibit dan memelihara tanaman.
 - 2) Keterampilan memberantas penyakit dan hama tanaman.
 - 3) Keterampilan mengolah hasil dan memasarkan.
 - 4) Keterampilan beternak hewan dan ikan.
 - 5) Keterampilan membina usaha pertanian/agribisnis.
- i. Kebutuhan belajar yang berhubungan dengan pelayanan jasa.
- 1) Keterampilan mengemudi.
 - 2) Keterampilan perbengkelan.
 - 3) Keterampilan pelayanan jasa angkutan.
 - 4) Keterampilan yang berkaitan dengan jasa lainnya.

Sudjana (2000) menyebutkan bahwa partisipasi warga belajar terhadap kegiatan proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan dan dikembangkan di dalam program pendidikan masyarakat. Suatu program pendidikan luar sekolah yang menggunakan strategi pembelajaran partisipatif mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kebutuhan Belajar (*Learning Needs Based*)

Kebutuhan belajar adalah setiap keinginan atau kehendak yang dirasakan dan dinyatakan oleh seseorang, masyarakat atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan atau sikap tertentu melalui kegiatan pembelajaran. Sumber informasi tentang kebutuhan belajar adalah peserta didik atau calon peserta didik, masyarakat dan atau organisasi. Pentingnya kebutuhan belajar didasarkan atas asumsi bahwa peserta didik

akan belajar secara efektif apabila semua komponen program pembelajaran dapat membantu peserta didik untuk memenuhi kebutuhan belajarnya.

2. Berorientasi Pada Tujuan Kegiatan Pembelajaran (*Learning Goals and Objectives Oriented*)

Kegiatan pembelajaran partisipasi direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam perencanaan, tujuan belajar disusun dan dirumuskan berdasarkan kebutuhan belajar. Tujuan belajar itupun dengan mempertimbangkan latar belakang pengalaman peserta didik, potensi yang dimilikinya, sumber-sumber yang tersedia pada lingkungan kehidupan mereka, serta kemungkinan hambatan dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu kebutuhan belajar, potensi, dan sumber-sumber serta kemungkinan hambatan perlu diidentifikasi terlebih dahulu supaya tujuan belajar bisa dirumuskan secara tepat dan proses kegiatan pembelajaran partisipatif dapat dirancang dan dilaksanakan dengan efektif.

3. Berpusat Pada Peserta Didik (*Participant Centered*)

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan atas dan disesuaikan dengan latar belakang kehidupan peserta didik. Latar belakang tersebut perlu menjadi perhatian utama dan dijadikan dasar dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran partisipatif. Peserta didik diikutsertakan pula dalam kegiatan identifikasi kebutuhan belajar, sumber-sumber, serta kemungkinan hambatan serta dalam kegiatan merumuskan tujuan belajar. Para peserta didik dilikutsertakan dan memegang peranan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan belajar. Dengan berpusat pada peserta didik,

mengandung makna bahwa peserta didik lebih banyak berperan dalam proses pembelajaran partisipatif.

4. Berangkat dari Pengalaman Belajar (*Experiential Learning*)

Kegiatan pembelajaran disusun dan dilaksanakan dengan berangkat dari hal-hal yang telah dikuasai peserta didik atau pengalaman di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan serta dengan cara-cara belajar (*learning styles*) yang biasa dilakukan peserta didik

Sistem pembelajaran partisipatif diupayakan dapat mewujudkan proses pembelajaran yang dibangun atas beberapa komponen sebagai berikut: (1) warga belajar diperankan sebagai subjek, bukan objek, (2) pembelajar atau instruktur berfungsi sebagai fasilitator dan mitra belajar dengan warga belajar, bukan pengawas dan instuktur, (3) materi pembelajaran disusun bersama antara pembelajar dengan warga belajar, (4) metode pembelajaran berpusat pada cara belajar melalui pengalaman, (5) evaluasi pembelajaran menitikberatkan pada penalaran proses belajar dan penilaian diri, bukan sekedar hasil belajar, (6) media pembelajaran disesuaikan pada karakteristik materi, lingkungan dan kondisi warga belajar, dan (7) jadwal pembelajaran disusun secara fleksibel.

Marzuki (1992) memberikan identifikasi bahwa pembelajaran partisipatif memiliki beberapa ciri sebagai berikut: (1) melibatkan warga belajar dalam menentukan, merevisi serta mengidentifikasi tujuan, (2) tutor membantu warga belajar dalam kegiatan belajar dan membantu mengatur kegiatan tersebut, (3) melibatkan warga belajar dalam mengambil keputusan, mengembangkan ide-ide dan pemikiran, menyumbangkan saran dan menchrma kritik dari warga belajar,

(4) mendorong kerja sama antara warga belajar dan menciptakan suasana belajar terbuka, saling mempercayai dan saling memperhatikan satu sama lain, dan (5) melibatkan warga belajar dalam penilaian.

C. Asumsi-asumsi Dasar

Asumsi Pertama, bahwa Pendidikan Masyarakat pada dasarnya merupakan proses pemberdayaan. Dalam proses pemberdayaan diasumsikan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan, kemauan, kemampuan untuk berkembang, disamping itu manusia memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang penting bagi dirinya serta dapat menggunakan pengalaman sebagai sumber belajar. Asumsi Kedua, bahwa Pendidikan Masyarakat merupakan bagian dari pembangunan pendidikan nasional.

Tabel 1.1 Paradigma Sistem Belajar Masyarakat

Nirmana Pelajar \ Nirmana Pengajar	SENGAJA	TIDAK SENGAJA
	SENGAJA	Pendidikan Formal (diluar Persekolahan) Pendidikan Non- Formal (Diluar Sekolah)
TIDAK SENGAJA	Pendidikan In-Formal 1 (Pembelajar In- Formal)	Pendidikan In- Formal 3 (Belajar secara Kebetulan)

Keterangan : Wilayah berarsir adalah garapan pendidikan masyarakat sebagai spesialisasi

(Supriono, 2012: 21)

Pokok-pokok kebijakan pendidikan nasional pertama kali dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, yang berisi:

1. Pendidikan agama perlu diberikan perhatian seksama dengan asas kemerdekaan beragama. Adapun madrasah dan pesantren sangat perlu mendapat perhatian dan bantuan nyata dari pemerintah.
2. Pengembangan optimal pendidikan tinggi termasuk memanfaatkan bantuan guru besar asing dan pengiriman mahasiswa untuk studi keluar negeri.
3. Wajib belajar 6 tahun yang diharapkan telah merata dalam jangka waktu satu dekade.
4. Perlu ada perubahan pedoman pendidikan dan pengajaran. Yang paling mendasar adalah mengubah faham individualisme menjadi faham kesusilaan dan perikemanusiaan yang tinggi.
5. Demi persatuan dan keadilan sosial, sekolah harus dibuka untuk segala lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.
6. Sistem pendidikan perlu berorientasi vokasi, leadership dan pemberantasan buta huruf.
7. Pendidikan Teknik dan Ekonomi khususnya pertanian, industri, pelayaran dan perikanan perlu mendapat perhatian istimewa.
8. Pendidikan Kesehatan dan Olah Raga hendaknya dilaksanakan secara teratur.
9. Pendidikan gratis bagi siswa Sekolah Rakyat, sedangkan bagi siswa sekolah menengah dan perguruan tinggi diupayakan pengaturan pembiayaan dan tunjangan yang luas agar dapat membantu akses bagi mereka yang kurang mampu.

D. Sejarah Pendidikan Masyarakat

Pada masa sebelum penjajahan, pendidikan masyarakat dilakukan secara informal keluarga yakni oleh orang tua kepada anaknya, baik sebagai tuntutan upacara adat maupun menanamkan pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja mencari nafkah. Biasanya ini dilaksanakan oleh orang tua kepada anak-anaknya sesuai pekerjaan orang tua seperti: bercocok tanam, berkebun, nelayan, berburu.

Pada masa penjajahan Portugis, Pendidikan Masyarakat diberikan bagi warga yang mau memeluk agama Roma Khatolik. Pendidikan itu berupa pendidikan tentang keagamaan atau pendidikan umum yang terkait dengan kehidupan .

Pada masa penjajahan Belanda, Pendidikan Masyarakat diberikan melalui pengajaran dan pelatihan yang mengandung materi keagamaan, materi pendidikan umum dan keterampilan. Tujuan itu diarahkan untuk mencetak pekerja, baik di perkebunan maupun pembuatan jalan baru.

Pada masa penjajahan Jepang, Pendidikan Masyarakat diberikan untuk menyiapkan tenaga kerja dan para prajurit yang tangguh guna membantu Jepang memperoleh kemenangan dalam peperangan. Pendidikan ini terorganisir secara baik walaupun pada waktu itu kondisi Negara Indonesia dalam situasi peperangan.

Pada awal kemerdekaan, banyak diadakan berbagai pendidikan dan kursus untuk pengetahuan umum, kepemudaan dan keolahragaan. Bahkan kursus dan pelatihan menjangkau bidang dan sasaran lebih luas yaitu pelatihan keprajuritan, pelatihan orang dewasa, dan pelatihan untuk para ibu-ibu. Berbagai macam kursus dan pelatihan tersebut dilaksanakan oleh para relawan pejuang kemerdekaan dan oleh pimpinan negara.

Tujuannya adalah untuk membantu para pejuang dalam peperangan dan sekaligus untuk ikut serta mencondraskan masyarakat. Kondisi pendidikan tersebut semakin jelas terorganisir dan berlangsung secara baik, dengan bukti adanya Pembentukan Jawatan Pendidikan Masyarakat tanggal 14 Nopember 1949 Nomor 423/A dengan tugas yang berat tetapi mulia yakni: (1) membangunkan, menyadarkan, menginsafkan dan mengisi masyarakat di luar dunia sekolah agar tiap warga negara menjadi anggota masyarakat untuk sadar, hidup, berguna, dan berharga bagi negara, nusa, bangsa dan dunia. (2) pendidikan masyarakat harus mempercepat revolusi jiwa masyarakat. Dengan pembentukan Jawatan Pendidikan Masyarakat terlihat jelas bahwa ada pengakuan dari pemerintah bahwa kegiatan kursus dan pelatihan menjadi bagian penting dari pendidikan. Pembentukan Jawatan Pendidikan Masyarakat semakin memberi peluang yang luas untuk penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dengan bermacam-macam kegiatan bagi masyarakat. Adapun bentuk-bentuk kegiatan Jawatan Pendidikan Masyarakat meliputi:

- 1) Kursus dan Pelatihan. Kegiatan kursus dan pelatihan ini dapat menggunakan waktu penuh dan waktu tidak penuh/paruh waktu.
- 2) Kumpulan Belajar. Kumpulan belajar ini biasanya kumpulan dari orang-orang yang ingin belajar membaca-menulis dan pelatihan keterampilan tertentu.
- 3) Kelas Bebas. Kelas bebas merupakan kumpulan belajar yang diadakan pada waktu yang tidak tertentu dan pesertanya adalah mereka yang punya waktu luang atau mereka yang tertarik pada isi kelas bebas tersebut.

- 4) Pama dan Pami. Disebut Pama singkatan dari Pakempalan Maos, artinya perkumpulan membaca dan Pami singkatan dari Perkumpulan Mirengaken, artinya perkumpulan mendengarkan.
- 5) Sekolah Keliling ditujukan kepada anak-anak, pemuda dan orang dewasa, pria dan wanita yang materinya meliputi: a). Pengetahuan umum, termasuk PBH. b). Pertanian dan perkebunan, c). Peternakan dan perikanan. d). Pertunanan, pemintalan, dan jahit menjahit, e). Makanan sehat Kesehatan dan Kerajinan .

Pada tahun 1960 di tingkat pusat terjadi perubahan yang bersifat kelembagaan. Pada tahun 1966, Jawatan Pendidikan Masyarakat digabungkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan tahun 1969, Jawatan Pendidikan Masyarakat dialihfungsikan kepada Direktorat Jenderal Olahraga dan Pemuda dan menjadi Direktorat Pendidikan Masyarakat.

Pada tahun 1974, Direktorat Jenderal Olahraga dan Pemuda disempurnakan menjadi Ditjen PLSOR. Tahun 1978, Ditjen PLSOR disempurnakan menjadi Diklusepora.

Pada tahun 1983 kegiatan Pendidikan Non-Formal yang terkait dengan pembangunan desa semakin mencuat. Diantaranya pendidikan orang dewasa, pemberantasan buta huruf fungsional, pendidikan perluasan, pelatihan keterampilan pertanian, pelatihan kader koperasi, pendidikan kependudukan, keluarga berencana, pendidikan gizi keluarga, pelatihan keterampilan produktif, pendidikan dan pelatihan kepemudaan, organisasi pramuka dan pelatihan kader pembangunan masyarakat. Selain itu, kelompok belajar Paket A diintegrasikan dengan pendidikan mata pencaharian yang

disebut dengan istilah Kejar Usaha atau Upajiwu. Sementara itu, pendidikan masyarakat yang berbentuk pelatihan dilakukan juga oleh departemen-departemen lain di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, seperti: Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, dan Departemen Koperasi.

- a) Departemen Pertanian merupakan penyelenggara kegiatan PNF yang berhubungan dengan penyebarluasan pertanian, kursus dan pelatihan pertanian dan pertukangan, demonstrasi pertanian lapangan dan bimbingan Sapta Usaha Tani.
- b) Departemen Kesehatan merupakan penyelenggara kegiatan PNF yang berkenaan dengan Posyandu, bimbingan kesehatan lingkungan, Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Puskesmas, pelatihan bagi dukun bayi, pencegahan penyakit menular dan keluarga berencana.
- c) Departemen Tenaga Kerja merupakan penyelenggara kegiatan PNF yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja baik bidang industri (BLKI), jasa maupun pertanian (BLKP), *Mobile Training Unit*, magang, dan pelatihan di perusahaan atau industri.
- d) Departemen Penerangan merupakan penyelenggara kegiatan PNF terutama yang berkaitan dengan berbagai penyuluhan kepada masyarakat, seperti Siaran Pedesaan, Kelompencapir dan Asah Terampil. Departemen Penerangan ini sekarang sudah dimerges ke departemen lain.

- e) Departemen Sosial merupakan penyelenggara PNF yang menyangkut bimbingan dan penyuluhan sosial, karang taruna, bimbingan keterampilan praktis, pembinaan rehabilitasi kesejahteraan sosial seperti panti asuhan dan lembaga pengentasan kemiskinan.
- f) Departemen Dalam Negeri merupakan penyelenggara kegiatan PNF yang dilaksanakan di berbagai organisasi, seperti kelompok pembangunan, teknologi pedesaan, LKMD, PKK, Pramuka, dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan.
- g) Departemen Agama merupakan penyelenggara kegiatan PNF melalui dakwah, bimbingan kehidupan keluarga, pembinaan umat beragama, pembinaan pondok pesantren, kursus keagamaan, dan pembinaan organisasi keagamaan.
- h) Departemen Koperasi merupakan penyelenggara kegiatan PNF dalam bentuk penyuluhan, kursus koperasi, pendidikan koperasi, KUD, dan pembinaan organisasi perkoperasian.
- i) Kegiatan pendidikan masyarakat yang juga penting adalah kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, pondok pesantren, dan sekolah menengah, seperti: Kuliah Kerja Nyata sangat erat hubungannya dengan pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat, pembinaan pribadi mahasiswa serta untuk pengembangan kurikulum perguruan tinggi yang sesuai dengan tuntutan pembangunan. Program Kerja Mahasiswa merupakan wujud aktivitas turun ke desa yang dilakukan oleh para mahasiswa. Pondok Pesantren Darul Falah dan Pondok Pesantren Pabelan, kedua pondok pesantren tersebut tidak

hanya ditujukan pada *civil effect* tetapi juga *social effect* yakni kepada para santri diberikan bekal bagaimana nantinya ia berfungsi dalam masyarakat, mampu membawa kemajuan dalam masyarakatnya. Pendidikan Kedesaan Model Sekolah Farming Menengah Atas, pada kurikulum SFMA yang baru berorientasi pada *learning by doing*, artinya setiap siswa harus menunjukkan kerja nyata yang merupakan pelaksanaan dari teori yang didapatinya. (Oong Komar (2006); Joesoef (1993); Faisal, S dan Abdilah Hanafi (1979).

Mulai tahun 1994 dengan dicanangkannya Program Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun), Dikmas dipercaya untuk ikut menyukseskan program nasional tersebut melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah. Untuk melaksanakan tugas ini, Dikmas menyelenggarakan program Paket A setara SD, Paket B setara SLTP lengkap dengan sistem pengujiannya. Tugas tersebut menjadi berat karena peningkatan volume tugas sebagaimana diamankan oleh program tersebut, tidak diiringi dengan adanya peningkatan kapasitasnya. Akibatnya, kemampuan Dikmas dalam melaksanakan sangat terbatas.

j) Pendidikan Masyarakat Masa Reformasi

Pendidikan masyarakat pada masa reformasi ini memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan pada masa pendidikan masyarakat sebelumnya. Keadaan ini tidak terlepas dari kondisi politik nasional serta perkembangan pemikiran dunia internasional tentang pendidikan. Jika ada sebagian kalangan masyarakat menyimpulkan bahwa pendidikan pada awal masa reformasi jalan di tempat bias jadi benar, namun tidak sepenuhnya benar. Benar, karena pada

masa itu adalah masa transisi, dimana eforia masyarakat pada semua bidang termasuk bidang pendidikan sangat tinggi bahkan semangat meniadakan program-program pada masa orde baru, hingga melakukan perubahan struktural kelembagaan Dikmas sangat tinggi.

Pada awal-awal era reformasi pendidikan masyarakat kurang berkibar ada semacam eforia yang menganggap bahwa produk orde baru dianggap buruk dan harus direformasi tanpa kecuali. Namun demikian tidak sepenuhnya kondisi pendidikan dipengaruhi oleh situasi dalam negeri. Perkembangan pendidikan masyarakat di era reformasi juga dipengaruhi komitmen dunia memenuhi deklarasi Dakar. Deklarasi Dakar Sinegal tentang *Education for All (EFA)* pada tahun 2000. Kerangka Aksi Dakar di atas, titik beratnya adalah bagaimana sebagai bangsa berupaya memenuhi pendidikan dasar dalam bentuk pemberian pendidikan keaksaraan bagi semua warga negara yang karena berbagai kesulitan, kemiskinan, keterbelakangan, social ekonomi serta budaya, tidak berkesempatan atau tidak memperoleh akses pendidikan. Ini merupakan tanggung jawab Negara dan semua komponen bangsa untuk memenuhinya.

Bagi bangsa Indonesia deklarasi Dakar merupakan suatu dorongan untuk menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945. UUd 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan "setiap warga Negara berhak mendapat pengajaran". Pernyataan yang lebih tegas terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, pasal 31 ayat (2) bahwa "setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pamarintahan wajib membiayai". Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal dan ayat-ayat UUD1945 ini dituangkan secara konsisten ke dalam peraturan-peraturan dibawahnya, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan dinamika pemikiran tersebut diatas serta kondisi sosial politik pada awal tahun 1998, pemerintahan telah menerbitkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 sebagai pengganti dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 2 Tahun 1989. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 ini telah memberikan landasan yuridis terhadap pendidikan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan informal dan nonformal. Dalam undang-undang tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, informal, dan nonformal.

Ruang lingkup pendidikan masyarakat menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dengan jelas tertuang dalam beberapa pasal, diantaranya pasal 4 ayat 5 yaitu: pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya baca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pasal 26 ayat 3 yaitu: pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 memberikan pengakuan terhadap penyelenggaraan program pendidikan nonformal dan informal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni mendorong terciptanya insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Penyelenggara program pendidikan informal dan nonformal atau lebih dikenal dengan pendidikan masyarakat lebih mengedepankan prinsip demokratisasi dan fleksibilitas yang memberikan kesempatan dan kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan kegiatan belajar yang diyakini sebagai kebutuhan belajar sangat diperlukan (*community based education*), baik dalam rangka peningkatan kualifikasi pendidikan masyarakat maupun untuk menemukan solusi terhadap masalah tertentu melalui program pendidikan masyarakat yang relevan.

Sejalan dengan undang-undang tersebut, untuk memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses yang bermutu telah dikembangkan pendidikan masyarakat sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan masyarakat memberikan ruang dan peluang seluas-luasnya bagi warga belajar untuk memperoleh pengetahuan melalui pembelajaran mandiri, pembelajaran yang ditempuh dari jalur pendidikan tertentu, pembelajaran sekolah rumah dan pendidikan alternative lainnya, serta pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman bekerja. Pendidikan masyarakat juga memberikan keterampilan fungsional dan kepribadian profesional. Adapun program pendidikan masyarakat meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan pelatihan dan kursus, pendidikan pengarusutamaan gender, minat budaya

baca, pendidikan perempuan, life skill, kewirausahaan, program kemitraan dan program-program lainnya yang mampu “membelajarkan” masyarakat.

Secara konseptual, pendidikan masyarakat diartikan sebagai layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa melihat perbedaan tingkat pendidikan, usia, status social, ekonomi, agama, suku, dan kondisi mental fisiknya, yang mempunyai keinginan untuk menambah dan atau meningkatkan kompetensi atau mempelajari kompetensi baru untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Salah satu lembaga pemerintah yang menangani dan melaksanakan misi tersebut adalah Direktorat Pendidikan Masyarakat di bawah Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.

Direktorat Pendidikan Masyarakat merupakan salah satu unit teknis di lingkungan Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, yang mengemban tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, serta melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan masyarakat. Adapun cakupan tugas yang menjadi tanggung jawab direktorat pendidikan masyarakat pada masa reformasi (pemberantasan buta aksara), pendidikan perempuan dan pengarusutamaan gender bidang pendidikan peningkatan budaya baca dan program kemitraan.

Program pendidikan masyarakat tersebut merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal dan informal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat secara fungsional, sehingga hasil belajarnya dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari demi

meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya. Lama waktu belajar pada pendidikan masyarakat relative fleksibel, ada yang satu minggu, sebulan, setahun, dan ada pula yang lebih dari satu tahun. Semuanya tergantung pada: 1) Waktu kegiatan disesuaikan dengan perbedaan kebutuhan warga belajar dan potensi yang tersedia di masyarakat; 2) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran disusun berdasarkan pada inisiatif dan partisipasi warga belajar dengan meyeratkan masyarakat sekitar; 3) Hubungan antara tutor pembimbing dan warga belajar bersifat mitra sejajar atas dasar kefungisian; serta 4) Pembinaan program dilakukan secara demokratis antara tutor, warga belajar, dan pihak lain yang berpartisipasi. Kebutuhan warga belajar untuk meningkatkan mutu dan taraf hidupnya.

Pendidikan masyarakat memiliki nilai strategis, karena secara filosofis manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk pembelajar. Berarti, setiap manusia perlu pendidikan dan belajar sepanjang kchidupannya (*life long learning*). Filosofi ini menanamkan kesadaran yang bersifat religious, bahwa ilmu pengetahuan bukanlah hasil ciptaan manusia, tapi hasil temuan atau pencarian manusia. Untuk itu, penyelenggaraan pendidikan masyarakat harus mengarah pada terciptanya konsep yang melihat masyarakat bukan hanya sebagai objek dan sasaran pendidikan, tapi sebagai subjek, pelaku pemilik dan penyelenggara pendidikan. (Supraijanto, 2011: 156)

Dengan demikian pelaksanaan pendidikan masyarakat dilaksanakan dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi tertentu agar mereka dapat bertahan dalam

menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan.

j. Pendidikan Masyarakat Masa Kini

Pengembangan pendidikan masyarakat merupakan peningkatan kemampuan personal dan kolektif masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Pengembangan pendidikan masyarakat akan bertumpu pada peningkatan kemampuan literasi masyarakat, karena sangat fundamental sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan target Dakar dan target Millenium Development Goals, komitmen nasional sesuai UUD 1945, UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, serta peraturan pemerintah terkait.

Dalam prakteknya pendidikan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan seiring dengan dinamika dan kondisi yang ada di masyarakat dengan keragaman lingkungannya. Untuk itu maka perumusan pendidikan masyarakat kedepan berdasarkan tantangan yang dihadapi perlu dirumuskan secara komprehensif sesuai dengan hasil kajian secara akademis dan empiris.

1). Pendidikan Keaksaraan

Program pendidikan keaksaraan yang telah dilakukan sejak bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945 hingga saat ini ternyata belum mampu membebaskan warga masyarakat dari buta aksara. Pada saat ini lebih dari 90% penduduk Indonesia buta aksara telah berhasil dikurangi. Pada periode 1971-2008, program pemberantasan buta aksara menunjukkan perkembangan hasil yang sangat signifikan, dan pada akhir tahun 2015 diharapkan penduduk buta aksara di

Indonesia hanya mencapai 2%. Tantangan yang kemudian muncul adalah bagaimana memberdayakan mereka mampu menolong diri dan keluarganya dalam kehidupan mereka (keaksaraan untuk pemberdayaan).

2). Pengembangan Budaya Baca

Laporan berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih rendah, berdasarkan Vincent Greannary yang dikutip oleh World Bank (1998) menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa kelas VI SD Indonesia menduduki ranking ke-29 dari 30 negara yang diteliti, dan untuk siswa SLTP hanya mencapai nilai 51,7 dan berada pada urutan paling akhir setelah Filipina (52,6), Thailand (65,1), Singapura (74,0), dan Hongkong (75,5). Bisnis Indonesia (8 Februari 2006) mengungkapkan 17,8% atau 37,26 juta penduduk Indonesia masih dalam keadaan pra-sejarah (di bawah garis kemiskinan). Fakta lain mengungkapkan bahwa sampai saat ini Taman Bacaan Masyarakat di Indonesia mencapai jumlah 4.729 unit sedangkan jumlah desa di Indonesia 70.000. Dari data-data tersebut dapat diasumsikan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya dapat dikatakan masih belum menjadi masyarakat yang gemar membaca (*reading community*).

Merujuk pada kondisi tersebut, pemerintah menggiatkan program pengembangan budaya baca, yaitu program yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya baca, bahasa dan sastra Indonesia, serta bahasa daerah pada seluruh lapisan masyarakat termasuk peserta didik guna membangun masyarakat berpengetahuan, berbudaya, maju, dan mandiri. Program yang secara nasional dikembangkan adalah Taman Bacaan Masyarakat (TMB), yang berfungsi seperti perpustakaan.

3). Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Pendidikan pemberdayaan perempuan belum sepenuhnya mampu mengatasi rendahnya partisipasi perempuan dalam seluruh sector pembangunan dan berbagai bentuk diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan. Hal ini ditandai dengan angka buta aksara usia 15 tahun ke atas untuk seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2008 adalah 6,21%, dengan perempuan sebesar 7,82% dan laki-laki sebesar 4,45%. Angka partisipasi sekolah penduduk umur 7-15 tahun, APK, dan APM SD dan SMP tidak menunjukkan perbedaan yang berarti antara laki-laki dan perempuan, sedangkan partisipasi perempuan usia 16-24 tahun pada pendidikan menengah dan tinggi semakin menurun. Di samping itu, masih terdapat keterbatasan perempuan dalam mengakses pendidikan pada kategori bidang teknologi.

Perempuan juga rentan terhadap berbagai tindakan kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Tidak jarang perempuan mengalami luka-luka, cacat, atau secara psikologis mengalami trauma. Perempuan juga masih dianggap sebagai komoditas yang menarik untuk diperjualbelikan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kaum perempuan masih berada pada posisi marginal yang sering kali mendapat perlakuan diskriminatif sehingga dapat diasumsikan jauh tertinggal dibanding laki-laki. Hal ini juga membawa implikasi pada peran sosial dan profesi perempuan dan laki-laki dalam kehidupan social maupun pada lapangan pekerjaan. Persoalan ini juga terkait dengan social cultural yang ada di masyarakat, termasuk didalamnya nilai-nilai keagamaan.

4). Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sebagai "ikut serta", Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau kelompok baik secara fisik, mental, fikiran dan berbagai interaski lainnya dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu secara bertanggungjawab. Turinda (2009) menjelaskan definisi partisipasi masyarakat sebagai proses ketika sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta "ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kebijakan mereka. Dijelaskan oleh Conyers (1991) dalam Turinda (2009), partisipasi masyarakat dianggap sangat penting yang disesuaikan dengan bentuk-bentuk partisipasi menurut Santoso S Hamijoyo adalah sebagai berikut

- 1). Partisipasi buah pikiran yaitu menyumbangkan ide/gagasan, pendapat, pengalaman untuk keberlangsungan suatu kegiatan.
- 2). Partisipasi tenaga, dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, partisipasi spontan atas dasar sukarela.
- 3). Partisipasi harta benda, menyumbangkan materi berupa uang, barang dan penyediaan sarana atau fasilitas untuk kepentingan program.
- 4). Partisipasi keterampilan yaitu berupa pemberian bantuan skill yang dia miliki untuk perkembangan program.
- 5). Partisipasi sosial, yaitu keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan sosial demi kepentingan bersama.

Masyarakat selalu memiliki alasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kehidupannya, termasuk

dalam hal ini adalah keterlibatannya dalam berbagai hal yang oleh Turindra (2009) dibedakan dalam berbagai tipologi partisipasi masyarakat, dibawah ini merupakan karakteristik partisipasi masyarakat yang juga diperkuat dalam Pedoman Teknis Program PPAUD (2007:5-6), diantaranya adalah :

Tabel 1. 2 Jenis Partisipasi

No.	Jenis Partisipasi	Penjelasan
1.	Partisipasi Pasif/Manipulatif	Karakteristik masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelaksanaan proyek yang memperhatikan tanggapan masyarakat dan informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional diluar kelompok sasaran.
2.	Partisipasi Informatif	Memiliki karakteristik dimana masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
3.	Partisipasi konsultatif	Karakteristik masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, tidak ada peluang pembuatan keputusan bersama, dan para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan atau tindak lanjut)
4.	Partisipasi Intensif	Memiliki karakteristik masyarakat memberikan korban atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa intensif/upah. Masyarakat tidak

		dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-ekperimen yang dilakukan oleh masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif dihentikan.
5.	Partisipasi Fungsional	Karakteristik bahwa masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati, pada tahap awal masyarakat tergantung pihak luar namun secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.
6.	Partisipasi interaktif	Memiliki karakteristik bahwa masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan kelembagaan dan cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar mengajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
7.	Partisipasi self mobilization (Mandiri)	Memiliki karakteristik masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. Masyarakat

		<p>mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.</p>
--	--	---

E. Mengapa Pendidikan Penting

1. Sosialisasi Manusia

Proses sosialisasi terjadi pada interaksi antara individu dengan individu dan antara individu dengan lingkungannya. Proses individu dengan individu berlangsung didalam lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, dan lingkungan masyarakat. Proses interaksi antara individu dengan lingkungan berlangsung antara individu dengan lembaga-lembaga, kegiatan sosial, dan situasi yang terjadi didalam masyarakat. Kondisi ini disebutkan oleh Berger dan Luchmaen (Santoso, S.2010 :2-30) sebagai berikut :

- 1). *Primary socialisation is the first socialisation and individual undergoes and childhood through he becomes a member of family.* (sosialisasi utama adalah sosialisasi pertama individu yang berlangsung dalam kehidupan anak-anak dimana ia menjadi anggota keluarga). Dalam sosialisasi tersebut individu memperoleh pendidikan dari orang tuanya, anggota-anggota keluarga lain dan teman-temannya dalam berbicara, bersikap dan bertingkah laku sehingga ia dapat berinteraksi dengan individu lain dalam kehidupan. Akibatnya individu dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertambahan usia melalui perolehan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.

- 2). *Secondary socialisation is any subsequent proces wich inducty an already socialised individual into new sectors of the objective world of his society.* (sosialisasi kedua adalah beberapa bagian proses yang disosialisasi individu dalam sektor baru dari tujuan). Sosialisasi ini berlangsung apabila individu mengikuti kegiatan kelompok, mengisi kegiatan diwaktu luang atau kegiatan bermasyarakat sehingga individu semakin dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya. Proses sosialisasi ini dilakukan individu dengan mencontoh sikap dan tingkah laku individu lain atau individu berperan dalam aktivitas dengan individu lain. Dengan demikian perubahan status individu dalam kehidupan keluarga dan masyarakat semakin cepat tercapai seperti individu semakin matang dalam bersikap dan bertingkah laku.

Kehidupan individu dalam keluarga dan masyarakat, menjadikan individu mereaksi lingkungan tersebut secara tepat dan benar sehingga kehidupan individu tersebut tidaklah tetapi ia karena mengalami perubahan. Bauman (Santoso S, 2010:4) menggambarkan kondisi kehidupan individu dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai: “...*has typified is a liquid – that is it is never static, always changes, the rapidly changes has therefore produced a situation* (individu mempunyai tipe sebagai benda cair, yang ia tidak pernah diam (statis), selalu berubah. Kecepatan perubahan bagaimanapun juga mengkaitkan situasi).

Proses perubahan yang harus dijalankan oleh individu dapat berlangsung karena keluarga dan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai lingkungan kehidupan individu, juga keluarga dan masyarakat menjadi lembaga yang berfungsi

sebagai memberi pendidikan pada individu. Dalam proses pendidikan ini, individu memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan kecakapan yang sangat berguna bagi individu untuk menghadapi lingkungannya. Oleh karena itu, pendidikan dapat menghindarkan individu dari kesulitan yang dihadapinya dalam kehidupan baik dikeluarga maupun dimasyarakat. Dave R H (1976 : 85) secara tepat menggambarkan kondisi demikian dengan pernyataannya : “ *Education is a powerfull instrument for enabling man to take partin a form of social society which goes beyond the personal level of contact betwen a bear individuals.*” Beberapa contoh adalah *learning by doing, learning by teaching, peer- teaching.*

Pendidikan mempunyai fungsi sebagai penolong individu dalam rangka mengatasi persoalan – persoalan tersebut meliputi penerapan informasi dan teknologi yang dimiliki oleh individu untuk meningkatkan kehidupan. Rogers A (2005 : 58) menyebutkan : “ *Education was also been to be the potensial savior*” (pendidikan juga dipandang menjadi tenaga penyelamat). Pendidikan sebagai suatu proses berlangsung sepanjang kehidupan individu sehingga pendidikan selalu dapat membantu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh individu demi peningkatan kualitas kehidupan sesuai dengan tujuannya, oleh karena itu Dave R H (1976 : 9) menyatakan : “*Education is a viewed as a continuing proses guided by over - riding goal of improving the quality of lifed.*” (pendidikan dipandang sebagai proses berkelanjutan yang di bimbing oleh tujuan peningkatan kualitas kehidupan).

Perubahan yang terjadi dilingkungan individu, dapat berikan perubahan masyarakat yang biasanya dapat terjadi tanpa rencana atau direncanakan. Perubahan yang terjadi

dimasyarakat yang direncanakan oleh pihak luar, disebut dengan pembangunan yang ditujukan untuk mencapai hasil yang dapat memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat.

Hamilton E (Santoso S 2010:5) menyatakan ; *"Development is an ongoing strategic process designed to influence change for positive outcomes."* (pembangunan adalah proses strategi yang dirancang yang selalu berlangsung untuk mempengaruhi perubahan guna memperoleh hasil yang positif). Pembangunan yang dikaitkan dengan masyarakat dikenal dengan pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan masyarakat tersebut telah berlangsung sejak lama sampai sekarang.

Perubahan memang dapat terjadi dimasyarakat dan perubahan tersebut terus berlangsung sejalan dengan pembangunan masyarakat itu sendiri. Salah satu sebab terjadinya perubahan dimasyarakat adalah : *"society is in transformation, the transformation is too all."* (Longworth N dan Davies W K, 1996 : 7). Perubahan yang terjadi di dunia pendidikan terjadi dengan lahirnya sekolah pada abad pertengahan dan kebudayaan sekolah diawali dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh misi agama, kemudian sekolah-sekolah negeri oleh pemerintah dan akhirnya sekolah-sekolah oleh pihak swasta. Kondisi ini seseuai dengan uraian Rogers A (2005 : 31) bahwa : *"Education in this frame is at social transformation, overcoming inequalities which traditional schooling is perpetuating and even strengthening."* (pendidikan dalam kerangka ini ditujukan pada transformasi masyarakat yang memiliki ketidak cukupan kualitas dimana sekolah tradisional mengabaikan dan menguatkan).

2. Pendidikan dan Modal Manusia

Pengetahuan, keterampilan, nilai atau motivasi yang dimiliki oleh manusia merupakan hasil dari suatu aktivitas pendidikan yang dilkaukan oleh tri pusat pendidikan, mulai dari keluarga, masyarakat dan sekolah. Sejak dilahirkan manusia membawa potensi masing-masing yang berbeda satu sama lain. Namun potensi itu bersifat terpendam, sedangkan yang dapat mengungkap atau menumbuhkembangkan adalah melalui pendidikan. Tidak ada dalam suatu sejarah bahwa hidup manusia itu bisa berkembang tanpa pendidikan.

Hasil pendidikan tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan manusia sehingga manusia menjadi lebih bermartabat, menghargai dan dihargai satu sama lain. Manusia akan menjadi manusia yang bermanfaat di bumi ini jika mengembangkan potensi yang dimiliki, itulah yang dinamakan modal untuk melaksanakan kewajiban. Menurut Dahama dan Bhatnagar (1981:3), perubahan-perubahan sebagai hasil pendidikan adalah perubahan pada komponen-komponen perilaku, yaitu ide dan pengetahuan, norma dan keterampilan, nilai dan sikap, pemahaman dan perwujudan. Hasil pendidikan dari pendidikan tersebut tiada lain merupakan modal manusia. Pendidikan sebagai kunci utama untuk perubahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan setiap orang, organisasi atau perusahaan.

Modal Manusia (human capital) merupakan salah satu kapital penting dalam setiap proses pembangunan. Khususnya dalam usaha-usaha pengurangan kemiskinan. Bartlett 2004 (Ahmadi, 2014:277) mengemukakan ada empat tipe kapital.

1). Kapital manusia : seperti pengetahuan dan keterampilan;

- 2). Kapital Sosial : seperti kelompok dan jaringan
- 3). Kapital alam : seperti tanah dan air, Kapital fisik, seperti rumah, jalan dan sanitasi,
- 4). Kapital finansial : seperti tabungan, kredit dan tingkat upah.

Bangsa yang melek pendidikan (*education minded*) adalah bangsa yang orientasi terpenting dalam hidupnya tertuju pada dunia pendidikan. Bangsa dengan kultur seperti ini akan mengukur kesuksesan dari kesuksesannya dalam dunia pendidikan. Begitu pula dengan penghormatannya, diukur pula dari prestasi orang dalam bidang pendidikan. Contohnya. Adalah masyarakat Jepang, sejak dicanangkannya Restorasi Meiji Tahun 1880, masyarakat Jepang telah menjadi masyarakat yang begitu menghargai pendidikan, lebih dari dunia manapun di dunia. Salah satunya dalam hal menghormati sosok guru. Dampaknya pun sungguh luar biasa, kini Jepang termasuk salah satu negara maju dan berpengaruh di dunia.

Dengan demikian, jika bangsa Indonesia mampu menyelenggarakan pendidikan secara baik tentu akan membawa bangsa ini ke taraf pengetahuan keilmuan yang memadai untuk menjadikan bangsa kita produktif dan sejahtera. Hanya bangsa yang memiliki pengetahuan memadai yang bisa produktif dan dengan produktivitas inilah pada akhirnya akan menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Landasan Pendidikan Masyarakat

1). Deklarasi Dakkar tentang Pendidikan Untuk Semua(PUS),

Pendidikan untuk semua merupakan perwujudan demokratisasi bidang pendidikan dengan memberikan

akses seluas-luasnya kepada setiap warga negara, termasuk penyandang cacat atau mereka yang berkebutuhan khusus. Masyarakat miskin, komunitas minoritas, terisolir atau daerah tertinggal semuanya pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang memadai.

2). Amanat Konstitusi

1). Pembukaan UUD 1945

“...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kesejahteraan sosial”

2). Pasal 31 UUD 1945

a. Pasal 31 ayat 1

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

b. Pasal 31 ayat 3 pendidikan nasional.

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

c. pasal 31 ayat 5 Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nasional tinggi agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan perubahan serta kesejahteraan umat manusia.

3). Landasan Filosofi

Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

4). Sosial Budaya

- a. Nilai sosial budaya digali, dibina dan dikembangkan melalui proses pendidikan guna memperkuat kepribadian bangsa.
- b. Menata masyarakat melalui pendidikan berdasarkan fungsi-fungsi budaya yang universal dengan orientasi pada budaya lokal yang berkembang ke arah budaya nasional dan global.
- c. Proses revitalisasi potensi untuk membangkitkan kesadaran, pengertian dan kepekaan peserta didik terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik sehingga memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memperbaiki posisinya di dalam kehidupan masyarakat.

5). Psikologis

- a. Proses pendidikan diarahkan untuk mengoptimal kan karakteristik potensi yang dimiliki seseorang sehingga menuntut adanya lingkungan yang kondusif bagi kebutuhan belajarnya.
- b. Manusia dalam kehidupannya memerlukan hubungan dengan lainnya, sehingga membutuhkan berbagai nilai-nilai yang berkembang secara luas untuk kepentingan kelangsungan hidupnya.

6). Landasan Agama

Belajar ilmu adalah kegiatan sarat manfaat (multi-manfaat) mulai dari ibadah *mahdharah* (ibadah ritual) hingga ibadah ghairu *mahdhah* (ibadah sosial). Belajar ilmu adalah kegiatan yang tiada ada akhirnya.

Inilah yang disebut dengan pendidikan sepanjang usia (lifelong education) yang dalam hadist disebutkan “belajarlah sejak dari buaian hingga liang lahad”

Rasulullah SAW bersabda:

Yang artinya “menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun wanita. Dan penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu bahkan ikan di laut”.

Rasullah SAW bersabda :

“Pelajarilah ilmu dan amalkanlah ilmu”

Walaupun begitu, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi suatu hal yang eksklusif. Hanya golongan masyarakat tertentu saja yang menikmati pendidikan secara memadai, yaitu masyarakat yang memang punya biaya untuk keperluan pendidikan, sedangkan golongan miskin, masyarakat terisolir, penyandang cacat atau orang yang berkebutuhan khusus sangat sulit untuk mendapatkan layanan pendidikan secara memadai.

F. Pemikiran Tokoh-tokoh Tentang Pendidikan Nonformal informal

1. Malcolm Knowles

Knowles menghabiskan waktunya sekitar 8 tahun di Harvard, membuat ia ikut dalam kegiatan relawan imigran di *Boston's Lincoln House Settlement*. Pertama, ia memimpin diskusi kelompok pemuda dan olahraga serta mengadakan konseling keluarga imigran Italia. Ia juga aktif di *Harvard Liberal Club*, disela-sela kesibukannya, ia bekerja di *New York Time* di daerah *Cambridge*. Ayahnya Knowles mendapatkan

musibah kecelakaan yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit berbulan-bulan. Knowles membaca sebuah pengumuman agen yang menyediakan program studi kerja untuk pemuda pengangguran. Ia mencatat bahwa *direktur Massachusetts Administrasi Pemuda Nasional* ini adalah Eddie Casey, pelatih sepak bola Harvard. Knowles menerima tawaran itu dan tidak menyadari bahwa ia telah terlibat dalam pendidikan orang dewasa. Knowles telah menemukan model guru yang efektif untuk lembaganya dan ia mengembangkan sendiri gambaran pendidikan orang dewasa yang sesungguhnya, yakni bagaimana seharusnya mereka belajar? Seperti pengalaman di YMCA bahwa seorang instruktur itu harus peduli tentang ketertarikan siswa, daripada apa yang mereka percaya dari minat peserta didik. Dengan beberapa pengalamannya seperti di *YMCA Boston, Afiliasi USO di Detroit*, dan tahun 1946 sampai 1951 dengan YMCA tengah di *Chicago* ini, bila memungkinkan Knowles akan menghindari guru profesional, ia lebih menyukai orang awam yang berpengetahuan “bermain dengan ide-ide.”

Knowles mencoba untuk mendekatkan diri dengan siswa dikelasnya di *George William College*, ia membentuk “Tim Penyelidikan” untuk mengembangkan, mengeksplorasi, dan mendiskusikan isi yang mereka putuskan. Puncak karirnya di YMCA adalah ketika ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul *Informal Adult Education*, yang menceritakan pengalamannya dalam mengelola pendidikan orang dewasa, sekaligus tesis masternya di *Universitas Chicago*, yang diterbitkan *YMCA Association Press*. Pada tahun 1950. Dalam bukunya itu, Knowles mempopulerkan kembali pemikiran Rogers : “Pengajaran adalah sebuah proses yang memandu

interaksi antara guru, siswa, dan materi pengajaran. Mengajar seperti praktek medis, dan seharusnya sebagian sumber pada alam atau kerjasama dengan alam. Fungsi guru adalah membimbing siswa ke berbagai pengalaman yang akan memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi-potensi alamnya sendiri". Dari situ Knowless mulai mendefinisikan apa yang akan kemudian disebut Andragogi. Pada saat yang sama, ia menekankan peraturan kepemimpinan pendidik orang dewasa. Dia telah berbicara "dalam andragogi juga, pendidik orang dewasa adalah untuk menjadi pengarah." Teknologi andragogi dibagi menjadi tujuh langkah proses, yang bisa dipraktikkan sendiri karena bersifat flexibel :

- Menetapkan iklim pembelajaran kooperatif
- Menciptakan mekanisme untuk perencanaan bersama
- Mengatur diagnosis kebutuhan dan kepentingan pelajar
- Memungkinkan rumusan tujuan belajar berdasarkan kebutuhan dan kepentingan diagnosis.
- Mendesain aktivitas untuk mencapai tujuan
- Melaksanakan desain dengan memilih metode, materi, dan sumberdaya
- Mengevaluasi kualitas pengalaman belajar sambil mendiagnosa kembali kebutuhan untuk belajar lebih lanjut.

2. Ivan Illich

Ivan illich di *Cuernavaca Meksiko*, sebuah pusat pelatihan penelitian dan ia menjabat sebagai direktur program inovatif pendidik seluruh dunia. Pada tahun 1960 ia mendirikan sebuah lembaga yang bernama *Centre for Intercultural* sebagai wadah untuk melatih misionaris. Para misionaris dilatih untuk

mengembangkan asumsi-asumsi yang memungkinkan mereka mengambil tugas sebagai pendidik orang dewasa yang rendah hati dan hormat terhadap orang lain. Ia juga mendirikan sebuah toko untuk para misionaris. Ivan illich anti argumen kelembagaan dilihat dari empat aspek :

- Kritik proses pelebagaan
Masyarakat modern muncul untuk menciptakan sesuatu lebih banyak dan lebih melembaga, sehingga menyapu jalan hidup kita. Jalan kita menjadi resmi atau dilembagakan.
- Kritik ahli dan keahlian
Kritik Ivan Illich tentang para ahli dan para profesional telah ditetpkan dalam *Disabling Professions*.
- Kritik komodifikasi
Para profesional dan lembaga-lembaga cenderung mendefinisikan suatu aktivitas, dalam hal ini belajar sebagai komoditas pendidikan.
- Prinsip Counterproductivity
Counterproductivity adalah sarana yang pada dasarnya menguntungkan proses atau susunan ini berubah menjadi negatif. 'setelah mencapai batas tertentu, proses pelebagaan menjadi kontraproduktif'.

Ivan Illich berpendapat untuk menciptakan keramahan, bukan dengan lembaga manipulatif. Dalam sebuah lembaga yang menciptakan masyarakat yang ramah yang dapat melayani teknologi modern. Lembaga-lembaga seperti itu biasanya bersifat sosial, melayani masyarakat, dengan penggunaannya secara spontan dan sukarela. Dalam *Deschooling Society*, Illich berpendapat bahwa sistem pendidikan yang baik seharusnya memiliki 3 tujuan: 1).

Memberikan semua yang ingin warga belajar pelajari.2). Memfasilitasi semua orang yang ingin bernagi pengetahuan dan kemampuan. 3). Mencemukan orang-orang yang ingin belajar dari mereka dan untuk menciptakan bagi mereka yang ingin menyajikan suatu masalah kepada masyarakat supaya argumen mereka diketahui.

Ivan illich mengusulkan untuk melakukan sebaliknya. Ada 4 pendekatan yang berbeda yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan akses sumberdaya pendidikan yang dapat membantunya untuk menentukan dan mencapai tujuannya sendiri :

- 1). Referensi pelayanan pendidikan
- 2). Pertukaran kecakapan (Skill Exchange)
- 3). Pasangan sebaya (Peer-matching)
- 4). Referensi pelayanan untuk pendidik.

Pendekatan seperti itu digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi warga belajar yang ingin belajar dalam pendidikan non formal, belajar tidak harus terpaksa pada ruang kelas atau tempat-tempat yang dianggap sebagai gudangnya ilmu pengetahuan seperti perguruan tinggi dan sebagainya, belajar harus lebih banyak dilakukan dirumah-rumah, dikantor dan dapur,dalam konteks dimana pengetahuan dikerahkan untuk memecahkan masalah dan untuk menambahkan nilai kehidupan.

3. Paulo Freire

Paulo freire adalah seorang pendidik orang dewasa berkebangsaan Brazil, pengalamannya selama bertahun-tahun freire bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat miskin perkotaan. Ia mulai merumuskan cara berkomunikasi dengan

kaum miskin yang kemudian berkembang menjadi metode dialogis dalam pendidikan orang dewasa. Keterlibatannya dalam pendidikan orang dewasa juga mengarahkan freire masuk pada seminar dan kursus-kursus pengajaran dalam sejarah dan filsafat pendidikan di *Universitas Recife*. Ditengah-tengah gejolak politik yang terus memburu, freire menjadi *direktur Cultural Extension Service* pertama dari *Universitas Recife*, yaitu sebuah program layanan pemberantasan buta huruf atau keaksaraan bagi ribuan petani ditimur laut. Freire bukan hanya mengajar dan mendekontekstualisasikan instrumen keterampilan membaca dan menulis, tetapi juga mendorong mereka supaya ikut berpartisipasi politik melalui pengetahuan membaca dan menulis seperti yang diinginkan dan di cita-citakan. Freire menulis sebuah karya yang terkenal, *Pedagogy of the Oppressed*. Ia menuliskan bahwa pendidikan adalah sebuah jalan untuk menuju pembebasan permanen, melalui dua tahap, yakni : tahap pertama, dengan pendidikan orang menjadi sadar dari penindasan yang mereka alami, dan ia mulai mengubah keadaan. Tahapan kedua, dibangun berdasarkan tahap pertama dan merupakan proses permanen aksi pembebasan budaya.

4. Jerome S Bruner

Pada awaltahun 1940- an, Jerome bruner bersama dengan Leo, bekerja *sebagai* konsultan yang kebutuhan, motivasi, dan harapan-harapan (aset mental) mempengaruhi persepsi.jerome juga terlibat dalam desain dan pelaksanaan proyek yang berpengaruh *MACOS*, yang berusaha untuk menghasilkan gambaran kurikulum yang komprehensif atas

ilmu-ilmu perilaku. Kurikulum terkenal ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan:

- 1). Apakah manusia adalah makhluk yang unik?
- 2). Bagaimana mereka bisa seperti itu?
- 3). Bagaimana mereka diciptakan lebih daripada itu?

Bruner menyatakan bahwa kemampuan intelektual berkembang secara bertahap melalui langkah demi langkah perubahan dalam suatu pemikiran. *The Procces of Education* adalah buku petunjuk yang memiliki dampak langsung terhadap pembentukan kebijakan di Amerika Serikat dan mempengaruhi orientasi pemikiran beberapa kalangan, seperti guru dan sarjana. Pandangannya terhadap anak-anak sebagai pemecah masalah yang aktif dan siap untuk mengeksplor subyek yang sulit sambil keluar dari pandangan dominan pendidikan pada masa itu. Ada empat tema kunci dari buku *The Procces of Education*:

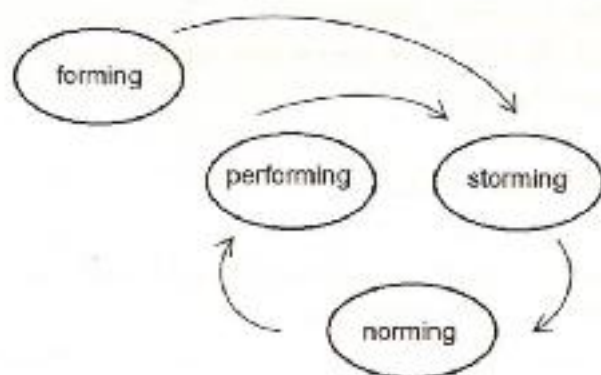
- 1). Peran struktur dalam pembelajaran dan bagaimana hal itu dijadikan pusat mengajar
- 2). Kesiapan untuk belajar
- 3). Berpikir intuitif dan analitis
- 4). Motif untuk belajar.

Mengajar seseorang bukan menjadi masalah untuk mendapatkan komitmen hasil pikiran. Sebaliknya, hal itu kemungkinan mengajarkan kepadanya untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan pengetahuan. Bruner meletakkan pekerjaannya dalam seluruh apresiasi budaya yang membentuk pikiran dan memberikan kita toolkit, kita bukan hanya membangun dunia, tetapi membangun konsep kita, diri kita dan kekuatan kita. Orientasi ini mengisyaratkan bahwa aktivitas mental manusia bukan dilakukan secara individual

atau tanpa bantuan, bahkan ketika berlangsung didalam kepala kita. Hal ini juga membawa bruner jauh melampaui batas-batas sekolah.

5. Bruce Wayne Tuckman

Bruce dikenal sebagai orang yang pertama kali mengajukan model pembentukan suatu kelompok pada tahun 1965. Untuk melengkapi teori ini kemudian Tuckman menambahkan tahapan yang kelima yaitu *adjourning* dan *transforming*. Bruce Wayne Tuckman (Sediapermana, 2013:98-100), penulis artikel *Developmental sequence in small group*. Menyatakan pembentukan kelompok efektif setidaknya perlu dilakukan melalui tahapan. Pembentukan dalam sebuah kegiatan, proyek, kelompok belajar dan *center learning* dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. pembentukan (*forming*), pengembangan ide-ide sesuai tugas yang harus diselesaikan (*storming*), kesepakatan aturan dan nilai yang diberlakukan (*norming*), berfungsi sesuai dengan tugas, dan fungsi masing-masing (*performing*). Tahapan berikut yaitu *adjourning* dan *trasforming* , yakni kelompok membubarkan diri dan anggota kelompok biasanya berkumpul kembali bila ada perubahan atau kesalahan ataupun ada perubahan lainnya. Adapun tahapan adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1. Model teori pembentukan kelompok

1). Forming

Pada tahap forming, kelompok baru dibentuk dan diberi tugas. Dimana anggota cenderung bersifat individual, egois dan cenderung memperhatikan skill individu, walaupun mereka mempunyai niat yang baik hanya belum saling mengenal dan saling mempercayai antara satu sama lain. Waktu lebih banyak dihabiskan untuk beradaptasi, merencanakan dan mengumpulkan informasi.

2). Storming

Setelah suatu kelompok terbentuk (forming) dan beradaptasi, maka maju ke tahapan yang kedua, storming. Dimana tahapan ini kelompok mulai mengembangkan ide-ide yang berhubungan dengan tugas mereka masing-masing. Membahas isu-isu dan problem yang mereka harus selesaikan, fungsi mereka dan model kepemimpinan yang mana yang akan mereka terima. Anggota kelompoknya mulai terbuka dan mulai saling mengajukan gagasan dan perspektif mereka masing-masing. Membahas isu-isu dan problem yang mereka harus selesaikan, fungsi mereka dan model kepemimpinan yang mana yang akan diterima. Anggota

kelompok mulai terbuka dan mulai saling mengajukan gagasan dan perspektif mereka. Tahapan ini sangat penting untuk perkembangan kelompok itu sendiri. Anggota kelompok memiliki sifat arif, bijaksana dan terbuka pada berbagai pendapat yang berbeda, karena pada tahapan ini tidak jarang terjadi konflik akibat perbedaan pendapat.

3). Norming

Pada tahapan ini, para anggota kelompok mulai saling percaya antara satu sama lain. Mereka mulai menemukan peran dan tanggungjawab dengan jelas, dan kelompok mulai menemukan irama seiring dengan kesepakatan aturan, nilai yang mereka gunakan. Tahapan ini juga membuat para anggota nyaman dan terus berkontribusi bagi kemajuan kelompok.

4). Performing

Selanjutnya pada tahapan ini kelompok mulai berfungsi sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Mereka menyelesaikan pekerjaan dengan lancar tanpa konflik yang tidak perlu. Para anggota kelompok saling ketergantungan dan saling melengkapi satu sama lain, mereka peka terhadap keadaan dan situasi yang ada, berkomunikasi dengan efektif dan berjalan dengan lancar.

5). Adjourning dan Transforming merupakan tahapan terakhir, ada proses yang berjalan ketika sedang menjalankan aktivitas kelompok tersebut dan seluruh proses tersebut berlandaskan pada hal-hal sebagai berikut :

a). Persepsi

Pembagian kelompok biasanya berdasarkan pada tingkat intelegen yang para anggota kelompok itu

sendiri, biasanya dilihat dari sisi akademisnya. Contohnya memiliki satu atau lebih kecerdasan dan diharapkan anggota yang memiliki hal itu bisa menularkan pada anggota lain.

b). Motivasi

Motivasi adalah hal yang paling fundamental untuk perkembangan kelompok itu sendiri, karena akan memicu kelompok berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Selain motivasi yang akan menjadi pemicu tumbuhnya suatu kelompok, skill yang bervariasi pada setiap kelompok juga akan memicu anggota lain untuk share ilmu pengetahuan supaya bisa memotivasi diri mereka sendiri.

c). Tujuan

Terbentuknya sebuah kelompok karena memiliki tujuan supaya dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompok atau individu.

d). Organisasi

Pengorganisasian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Dengan demikian masalah kelompok dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

e). Independensi

Kebebasan merupakan dasar dalam kehidupan demokrasi begitupun dalam kelompok yang merupakan dari kegiatan demokrasi. Kebebasan merupakan roh dalam perkembangan suatu kelompok. Kebebasan disini merupakan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai kelompok itu sendiri.

f). Interaksi

Interaksi merupakan sarana bagi kemajuan kelompok, disamping itu, interaksi juga merupakan medium transfer ilmu pengetahuan dalam perkembangan kelompok, baik interaksi secara langsung maupun tidak langsung.

Teori pembentukan kelompok model Tuckman ini sangat populer dan banyak dijadikan acuan oleh teoritis-teoritis lainnya.

6. Mary Carpenter

Pada tahun 1827 ia bekerja sebagai pengasuh di *Isle of Wight*. Dua tahun kemudian Maria bersama ibunya membuka sekolah untuk para gadis kecil di Bristol. Ia tertarik untuk mengurus anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan. Ia membuka sekolah lagi di sebuah perkampungan kumuh yang jauh dari perkotaan. Di tempat tersebut ia dihadapkan dengan beberapa masalah perilaku liar anak-anak miskin, namun ia berhasil mempertahankan kepentingan mereka dengan kemampuan dan antusiasnya. Mary carpenter mulai berfokus pada kebutuhan anak-anak yang lebih sulit, dan ia merasa terkejut ketika ia mengetahui bahwa orang-orang muda berperilaku criminal sejak usia dini. Pada tahun 1852 ia membuka asrama sendiri untuk anak laki-laki dan perempuan di Kingswood sebagai eksperimen publikasi gagasannya, dibantu oleh beberapa kelompok simpatisan untuk kebutuhan finansialnya, dan ia meminjam bangunan sekolah yang didirikan oleh John Wasley pada satu abad yang lalu. Ia adalah motivator pendidikan bagi kaum perempuan, dan ia

yakin tentang kebutuhan kaum perempuan yang terlibat dalam kehidupan sosial.

7. Robert Putnam

Seorang *penulis* dari sekian banyak penulis yang berprestasi dalam mengembangkan masyarakat. Ia fokus pada empat bidang perusahaan sosial: imigrasi; perubahan tempat kerja dan konsekuensi dari perempuan sebagai tenaga kerja yang dibayar; perubahan peran agama dalam masyarakat; dan kesenjangan, terutama bukti pemasangan warisan kelas dan bagaimana membatasi mobilitas sosial. Apa yang mereka temukan dalam penidikannya di Italia adalah ada hubungan yang kuat antara kinerja lembaga-lembaga politik karakter kehidupan masyarakat, yang mereka sebut dengan istilah masyarakat sipil, yaitu masyarakat yang ditandai oleh perjanjian sipil, kesetaraan solidaritas politik, kepercayaan dan toleransi serta kehidupan asosiasi yang kuat. Penelitiannya tentang kebijakan sipil dan modal masyarakat membawa dampak positif terhadap perkembangan pendidikan informal.

8. Bell Hooks

Bell Hooks menuliskan, mereka mengira bahwa ilmu pengetahuan tidak ada hubungannya dengan bagaimana mereka hidup dan berperilaku. Buku pertama Bell Hooks di bidang pendidikan adalah *Teaching to transgress*, yang di terbitkan pada tahun 1994. Ia berpendapat tentang pendidikan holistic progresif. Maksud dari istilah pendidikan sebagai praktik pembebasan menurut Bell Hooks adalah bahwa setiap orang bisa belajar. Mengajar bukan hanya sekedar berbagi informasi atau transfer ilmu saja, tapi untuk berbagai dalam pertumbuhan spiritual dan intelektual siswa. Mengajar dengan

cara menghormati dan memelihara jiwa-jiwa siswa adalah sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan intelektual. Kita mengajar harus memberikan suasana yang kondusif dan penuh keakraban. Bell Hooks adalah seorang feminis, dan baginya keaksaraan sangat penting untuk masa depan gerakan feminis, kesadaran menulis dan keterampilan sangat berfungsi untuk menghilangkan dominasi laki-laki, termasuk kesadaran politik dan pasar kerja. Ia memandang bahwa keaksaraan lebih dari sekedar bisa membaca dan menulis secara harfiah, namun menurutnya hal tersebut memungkinkan orang-orang terutama mereka yang masih termarginalisasi dan terdeskriminasi dalam masyarakat untuk memperoleh kesadaran kritis.

Pedagogi Bell Hooks adalah salah satu respon terhadap situasi spesifik kepada masing-masing kelompok siswa tertentu dan ia melihat bahwa pendidikan bukan hanya bisa didapat di dalam kelas saja, tetapi bisa didapatkan di mana pun dan dari siapa pun. Ia melihat orang tua dan siswa takut akan alternative cara berpikir, dan hal ini merupakan tugas pendidikan. Bell Hooks dalam tulisan pentingnya *'decolonisation of ways of knowing'* mengatakan bahwa semua ini merupakan tugas bersama untuk menyerukan akan pentingnya penegakan demokrasi dan hak-hak pendidikan setiap orang demi mengakhiri dominasi dalam segala bentuk kehidupan. Mengubah system sekolah sehingga siswa terhindar dari doktrinasi imperialis dan kapitalis serta supermasi patriaki kaum kulit putih atau idiologi atau apap pun namanya itu, mereka harus belajar secara bebas untuk membuka pikirannya sehingga siswa bisa berfikir kritis. (Sudiapermana, 2013).

BAB II

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

A. Bentuk-bentuk Layanan Direktorat Pendidikan Masyarakat

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Pendidikan Masyarakat merupakan salah satu direktorat dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal Informal (PAUDNI). Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah itu, Pendidikan Masyarakat memegang peranan sangat penting dalam sistem pendidikan nasional kita, mengingat saat ini adalah era informasi dan globalisasi. Terutama sasaran anggota masyarakat yang belum melek huruf diberdayakan karena kalau tidak tentu akan termarginalkan oleh kehidupan dan akan menjadi beban negara. Sebaliknya apabila kita berdayakan mereka akan menjadi penopang produktivitas bangsa dan ambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara konseptual pendidikan masyarakat diartikan sebagai layanan pendidikan yang diperuntukan bagi masyarakat umum tanpa melihat agama, suku, dan kondisi mental fisiknya, yang mempunyai keinginan untuk menambah dan atau meningkatkan kompetensi dengan mempelajari pengetahuan baru untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oleh sebab itu pendidikan masyarakat sering diartikan sebagai pendidikan luar sekolah (non formal),

walaupun sebetulnya pendidikan non formal lebih luas dari pendidikan masyarakat.

Direktorat Pendidikan Masyarakat adalah satu unit teknis dil lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, yang mengemban tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat dibidang pendidikan masyarakat. Adapun layanan yang merupakan tanggung jawab Direktorat Pendidikan Masyarakat yaitu (1) Pendidikan Keaksaraan atau program pemberantasan buta aksara, (2) Pendidikan Perempuan/Gender, (3) Peningkatan Minat dan Budaya Baca dan (4) Kemitraan. Untuk lebih jelasnya masing-masing bidang program layanan pendidikan masyarakat akan diuraikan berikut ini:

1. Pendidikan Keaksaraan

Secara historis pendidikan keaksaraan di Indonesia yang lazim disebut dengan Pemberantasan Buta Aksara (PBA) telah berjalan melalui kurun waktu dan proses yang sangat panjang karena sejak perang kemerdekaan para gerilyawan yang sudah dapat membaca, menulis, dan berhitung secara aktif mengajari rekannya yang belum dapat membaca dan menulis dan hingga saat ini pendidikan keaksaraan masih merupakan salah satu program pendidikan yang cukup penting. Pelaksanaan pendidikan keaksaraan yang dilaksanakan secara terencana dan terprogram dimulai sejak tahun 1964 yang terkenal dengan Pemberantasan Buta Aksara Tradisional. Dilihat dari presentasinya, jumlah buta aksara dari tahun 1945 sampai dengan 2006 menunjukkan penurunan

yang sangat dramatis. Jumlah buta aksara usia 15 tahun keatas pada tahun 2006 sekitar 13,6 juta orang, dari jumlah tersebut buta aksara kelompok usia 15-44 tahun masih sekitar 3,6 juta orang. Jumlah buta aksara di Indonesia yang masih besar menyebabkan peringkat Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) tahun 2005 menempati posisi 110 dari 117 negara.

Ada beberapa permasalahan yang menjadikan pelaksanaan pendidikan keaksaraan terkendala, diantaranya:

- 1). Secara geografis, kondisi negara kita masih cukup banyak daerah yang terpencil, perdesaan yang sulit transportasinya serta daerah yang masih terisolasi. Daerah yang karakteristiknya seperti itu masih relatif sangat luas, hal ini mengakibatkan pelaksanaan pendidikan keaksaraan didaerah tersebut menjadi sulit, walaupun bisa biayanya menjadi relatif mahal, sementara itu kemampuan pemerintah dan masyarakat masih terbatas.
- 2). Jumlah calon buta aksara baru setiap tahunnya terus bertambah akan tetapi jumlah buta aksara yang sebagian besar yaitu 11,7 juta atau 76,8% dari warga masyarakat yang buta aksara merupakan sasaran yang paling sulit. Karena mereka berusia diatas 45 tahun, yang kondisi ekonominya tergolong miskin, status sosialnya relatif rendah, dan tingkat kesehatannya pada umumnya juga kurang memadai menjadika motivasi dan daya tahan mereka untuk belajar sangat rendah. Berdasarkan jumlah buta aksara yang ada pada tahun 2006 sebanyak 13,16 juta orang atau 69% adalah perempuan. Ini berarti bahwa dalam melaksanakan pendidikan keaksaraan perlu diakitkan dengan program keadilan dan kesetaraan gender

agar disparitas gender pada masyarakat penyandang buta aksara dapat ditekan sekecil mungkin.

- 3). Selama ini kebijakan dan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat luas terhadap pendidikan kesetaraan masih kurang memadai, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah target warga masyarakat yang akan dimelekkaskarkan dan kecilnya dukungan dana untuk pendidikan keaksaraan, bahkan sebagian besar pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak memiliki anggaran untuk program pendidikan kesetaraan.
- 4). Buta aksara dianggap bukan masalah, padahal akibat dari besarnya jumlah buta aksara menjadikan program pengentasan kemiskinan kurang berhasil, Human Development Index Indonesia menjadi sulit ditingkatkan, dan produktivitas secara nasional juga rendah.
- 5). Akuntabilitas terhadap mutu dan hasil penyelenggaraan selama ini belum terukur dengan jelas. Hal ini antara lain ditandai dengan tidak adanya evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pendidikan keaksaraan secara kuantitatif maupun kualitatif serta tidak jelas siapa yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan pendidikan keaksaraan, sehingga sisa garapan setiap tahun relatif besar ditambah dengan buta aksara tetap besar. Namun demikian dibanding dengan negara berkembang lainnya diwilayah Asia Pasifik, Indonesia termasuk negara yang cukup berhasil dalam melaksanakan program pendidikan keaksaraan. Karena saat ini jumlah buta aksara di Bangladesh masih 63%, Pakistan sebesar 52%, Papua Newgini 81%, dan Nepal 47%.



Gambar 2. 1. Warga Belajar KUM (Keaksaraan Usaha Mandiri)

2. Pendidikan Perempuan/Gender

Dalam Undang-Undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara tertinggi, telah mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan baik ditingkat lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pendidikan yang terencana, terarah, dan berkesinambungan yang memberikan kesempatan yang sama pada seluruh warga negara baik laki-laki maupun perempuan. Pemerataan kesempatan pendidikan bertujuan untuk menciptakan keadaan dimana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" (Pasal 5 ayat 1). Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis. Kebijakan pemerataan dan perluasan kesempatan dalam pendidikan ini menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada setiap jenis, jenjang maupun jalur pendidikan, sehingga diharapkan bahwa keadilan pelayanan pendidikan akan meningkat.

Sebagai institusi negara, Direktorat Jenderal Pendidikan Masyarakat melalui Sub. Direktoral Pendidikan Perempuan telah memprioritaskan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dibidang pendidikan. Pendidikan perempuan merupakan perwujudan peningkatan kedaulatan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sub-direktorat Pendidikan Perempuan melaksanakan lima fungsi yakni penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan perempuan, penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur dibidang pendidikan perempuan, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pendidikan perempuan.

Terkait dengan itu, setidaknya ada tiga program utama yang dikembangkan Sub Direktorat Pendidikan Perempuan Direktorat Pendidikan Masyarakat, yakni pengembangan model pendidikan keluarga berwawasan gender, advokasi dan sosialisasi pendidikan adil gender, dan pengembangan model pendidikan alternatif perempuan. Untuk program

Pengembangan model Pendidikan Keluarga berwawasan gender, mencakup Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKRR), pencegahan, penanggulangan, dan perawatan korban narkoba, serta pendidikan pencegahan penularan HIV/AIDS.



Gambar 2.2. Perempuan belajar untuk keluarga yang berkualitas



Gambar 2.3. Perempuan trampil dan telaten

Untuk program advokasi dan sosialisasi pendidikan adil gender, meliputi perlindungan bagi kaum perempuan agar punya akses dan pelayanan yang bermutu dalam pendidikan, sosialisasi pendidikan adil gender pada setiap jenis, jenjang, dan jalur pendidikan serta sosialisasi pendidikan gender kepada semua pihak, terutama dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Sedangkan untuk program pengembangan model pendidikan alternatif perempuan, mencakup pendidikan bagi anak perempuan korban kekerasan, pendidikan bagi perempuan di daerah konflik, pendidikan bagi perempuan di daerah perbatasan, pendidikan bagi perempuan di daerah terisolir, pendidikan perempuan bagi buruh migran, pendidikan perempuan bagi buruh, pembantu rumah tangga, dan tenaga kerja wanita, pendidikan perempuan bagi pekerja seks komersial (PSK), serta pendidikan perempuan yang secara budaya masih terdiskriminasi.

3. Peningkatan Minat dan Budaya Baca

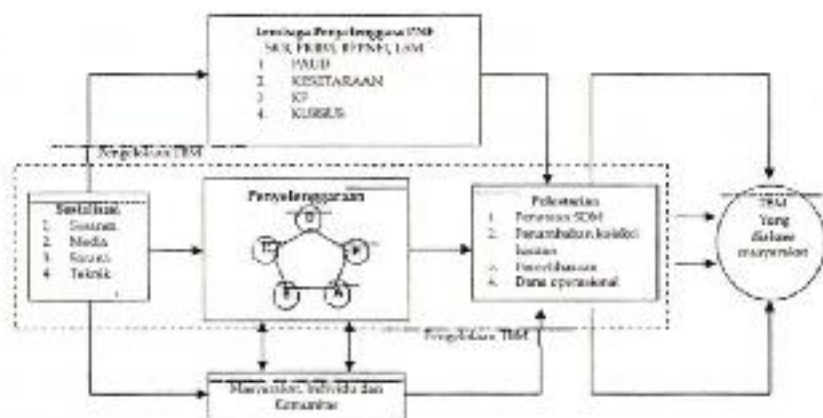
Perlunya peningkatan minat dan budaya baca ditingkatkan karena masyarakat kita cenderung lebih senang ngobrol atau ngerumpi ketimbang membaca buku, koran atau majalah. "Fenomena demikian, yakni masih kentalnya budaya lisan sungguh menjadi tantangan berat dalam membangun masyarakat gemar membaca. Pengembangan budaya baca dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya ialah melalui; perintisan dan penguatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di desa-desa; pemberian blocgrant ke TBM untuk membeli buku-buku koleksi baru; pelatihan pengelolaan TBM dan perpustakaan Desa; diskusi-diskusi yang bersumber dari buku-buku di TBM, dan sebagainya.

Pengembangan budaya baca dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa. Tujuan jangka panjang pengembangan budaya baca adalah: (1) untuk mencerdaskan bangsa; (2) mewujudkan masyarakat gemar belajar (*learning society*) dan; (3) menumbuhkembangkan industri perbukuan di desa-desa. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini, memang sudah sepatutnya ditindaklanjuti kampanye gerakan membaca, khususnya di kalangan masyarakat gemar membaca merupakan bagian dari upaya menuju pendidikan sepanjang hayat melalui pendidikan non formal. Membangun budaya baca melalui TBM merupakan program yang sangat strategis. Prioritas sasaran pengguna TBM adalah warga belajar dari program-program Pendidikan Non Formal, khususnya program Pendidikan Keaksaraan (Pemberantasan Buta Aksara), program Kesetaraan (Paket A setara SD, Paket B setara SLTP, Paket C setara SLTA).

Dengan kondisi tersebut, tugas Direktorat Pendidikan Masyarakat jelas tidak ringan. Sebab, selain harus meningkatkan budaya baca dan belajar masyarakat, lembaga ini melaksanakan layanan program pendidikan perempuan/gender, sekaligus harus menuntaskan uti aksara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, diperlukan program pembelajaran dalam bentuk dan satuan yang diarahkan pada makna kebutuhan belajar. Maksudnya, fokus materi pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar guna menunjang hidup dan pengidupannya. Kriteria bahan bacaan yang diperlukan adalah: (1) Sesuai dengan kemampuan belajar kelompok sasaran; (2) dapat membantu kelompok sasaran

untuk memelihara, menata, memantapkan dan meningkatkan kemampuan membaca; (3) Tertuju pada masalah nyata dan disesuaikan dengan kondisi objektif masyarakat (misalnya masyarakat nelayan, pertanian, atau pertukangan/kerajinan); (4) Mampu merangsang secara aktif dan mendorong sikap kritis terhadap berbagai masalah.

Program peningkatan budaya baca oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat bertumpu pada tiga pilar utama, yakni: (1) Terbentuknya Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di seluruh pelosok daerah; (2) Bahan bacaan yang sesuai kondisi objektif masyarakat; (3) Tumbuhnya minat baca masyarakat. Direktorat Pendidikan Masyarakat akan mendorong TBM sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Ke depan setiap desa nantinya diupayakan memiliki TBM. Untuk penyediaan bahan bacaan, karena masyarakat lapis bawah umumnya tidak punya akses maupun kemampuan membeli bahan bacaan, perlu adanya gerakan donasi buku yang melibatkan perorangan, lembaga pemerintah/swasta, dan kalangan penerbit. Mereka diharapkan mendukung keberadaan TBM melalui kontribusi bahan bacaan secara nyata. Berikut adalah bagan alur model pengelolaan TBM Kreatif dalam Melestarikan dan memperkuat kemampuan keaksaraan dan usaha mandiri, hasil kajian Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Unesa.



Bagan 2.1 Alur Model TBM

4. Kemitraan

Untuk mendukung dan memperkuat program layanan pendidikan keaksaraan, pendidikan perempuan dan program peningkatan minat dan budaya baca, maka sangat diperlukan adanya kemitraan dari berbagai pihak. Kemitraan kata yang terasa indah diucapkan, namun susah diwujudkan. Kemitraan (*partnership*) yang di dalamnya melekat unsur kesejajaran dan kesetaraan antar pelaku, jelas tak gampang dibangun dalam budaya masyarakat kita yang masih menganut paham paternalistik alias panutan. Padahal kemitraan menjadi media tunggal guna membangun dan memperluas akses pendidikan masyarakat yang melibatkan semua pihak. Untuk menjawab tantangan pengembangan kemitraan dan kerjasama, Direktorat Pendidikan Masyarakat menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh program, baik secara internal maupun lintas sektoral. Adapun pengembangan kemitraan kelembagaan ditujukan untuk memenuhi kepentingan, yakni percepatan pemberantasan buta aksara melalui Gerakan

Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PBA), peningkatan budaya baca dan belajar masyarakat, serta peningkatan akses pendidikan perempuan berdasarkan jenis, jenjang, jalur, dan satuan pendidikan, sementara tujuan akhir yang ingin dicapai dari tiga program tersebut adalah terwujudnya masyarakat gemar belajar (*learning society*). Untuk itu, Direktorat Pendidikan Masyarakat menggalang kemitraan dan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga seluruh program direktorat sampai ke masyarakat tanpa hambatan berarti.

Gambaran pelaksanaan kemitraan dan kerjasama yang telah dilakukan Direktorat Pendidikan Masyarakat, dengan Unit Pusat meliputi (1) Pusat Penelitian dan pengembangan Inovasi Balitbang, berbentuk studi-studi dengan perbaikan berbagai program Direktorat Pendidikan Masyarakat, (2) Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, dengan bentuk pengembangan kurikulum berbagai program pendidikan masyarakat, (3) Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk penusunan kebijakan berkaitan dengan ketenagaan dan SDM di lingkungan PNFI, serta (4) Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dalam bentuk kerjasama penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mensukseskan GNP-PBA dan suksesnya wajib belajar 9 tahun.

Kemudian Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dalam bentuk kemitraan dan kerjasama untuk mensukseskan GNP-PBA melalui Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa dan pendampingan program-program pendidikan masyarakat di daerah, kerjasama dengan kemitraan dengan perguruan tinggi, seperti Universitas Terbuka, UGM, UNJ, UPI Bandung,

Untirta Banten, UNPAK Bogor, dan lainnya, serta internal lingkungan Direktorat Jendral PNFI, dalam bentuk koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perancangan, pelaksanaan dan evaluasi program-program ke PLS-an.

Kemitraan dan kerjasama dengan lembaga/instansi di jajaran Kemandiknas, antara lain Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Subdin PLS dan Dinas pendidikan Kecamatan, dalam bentuk pelaksanaan program-program Pendidikan Masyarakat, serta kemitraan dengan BPPNFI, BPKB dan SKB dalam bentuk pengembangan model penyelenggaraan program-program pendidikan masyarakat. Saat ini telah keluar Inpres Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara dengan melibatkan instansi-instansi pemerintah, seperti Menkokesra, Depdagri, Depkeu, Depag, Meneg PP, BPS, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Bahkan, secara khusus sudah ada perjanjian kerjasama antara Mendiknas, Meneg PP dan Depdagri dalam penyelenggaraan program pemberantasan buta aksara perempuan. Kemitraan dengan lembaga internasional Non Government (NGO) sudah dijalin sejak dulu, seperti dengan UNESCO, UNICEF, ACCU, ASPBAE, SIL Internasional, ILO, dan lainnya.

Sedangkan dengan pemerintah negara-negara lain, meskipun berjalan pasang surut, tetapi program-program yang diselenggarakan pendidikan masyarakat telah dijadikan acuan dan dijadikan studi banding oleh negara-negara di Asia dan Afrika. Negara-negara itu antara lain Thailand, Filipina, Malaysia, Pakistan, Afganistan, dan India. Sudah banyak nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang ditandatangani untuk melaksanakan program-program

pendidikan masyarakat, terutama berkaitan dengan pemberantasan buta aksara, pendidikan perempuan, dan budaya baca masyarakat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan /keagamaan tersebut antara lain PKK, Muslimat NU, Aisyiah, Kowani, Pondok Pesantren, Wanita Islam, LPP-SDM, Lembaga Alkitab, dan PP Alhidayah. Upaya mensosialisasikan dan melaksanakan program-program pendidikan masyarakat, juga telah dijalin kemitraan dengan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, seperti dengan RRI, TVRI, TV kabel, TV Edukasi, TV swasta, koran Kompas, Suara Pembaharuan, Media Indonesia, dan Tempo.

Pemerintah di era Presiden SBY menyadari betul bahwa: pendidikan adalah salah satu dari Hak setiap warga negara; buta aksara merupakan penghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat karena buta aksara sangat berhimpit dengan kemiskinan, kebodohan, ketidakberdayaan dan keterbelakangan. Oleh sebab itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional dan Rencana Strategis pendidikan nasional 2005-2009 dengan tegas menetapkan untuk menurunkan jumlah buta aksara 50% dari total buta aksara yang ada di Indonesia pada akhir tahun 2009. Walaupun dalam Deklarasi Dakar tahun 2000 Indonesia menyepakati pengurangan 50% dari jumlah buta aksara orang dewasa pada akhir tahun 2015, akan tetapi untuk mengurangi jumlah buta aksara secara signifikan, maka dalam ketiga Rencana (Renstra Pendidikan Jangka Panjang, Renstra Depdiknas dan Renstra Pendidikan Nasional 2005-2009) menetapkan target 50% pada akhir tahun 2009. Ini berarti bahwa pemberantasan buta aksara dipercepat sehingga pada

akhir tahun 2009 jumlah buta aksara diharapkan tinggal 7,7 juta (50%).

Berdasarkan data Susenas 2003, sejumlah 12.526.387 orang tua atau 81,26% buta aksara berada di 9 (sembilan) provinsi yaitu dengan urutan kepadatannya sebagai berikut: (1) Jawa Timur, (2) Jawa Tengah, (3) Jawa Barat, (4) Sulawesi Selatan, (5) Nusa Tenggara Barat, (6) Nusa Tenggara Timur, (7) Papua, (8) Banten, dan (9) Kalimantan Barat. Sisanya berjumlah 2.887.824 orang atau 18,74% berada di 24 provinsi lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kantong buta aksara berada di 9 provinsi tersebut.

Mengingat adanya keterbatasan anggaran untuk merealisasikan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RP JM, Renstra Depdiknas, dan Renstra Diknas, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2006, tertanggal 9 Juni 2006 tentang: Gerakan Nasional Percepatan Penuturan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Dengan Inpres tersebut diharapkan segenap komponen bangsa secara bergotong royong akan mensukseskan pemberantasan buta aksara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan strategi dalam melaksanakan pemberantasan buta aksara ditempuh melalui:

Pertama, pemberantasan buta aksara tidak semata-mata mengandalkan ketersediaan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, akan tetapi mengerahkan semua potensi yang ada. Kedua, menggunakan pendekatan inovatif seperti penggunaan bahasa ibu bagi masyarakat yang bahasa tutur sehari-harinya bahkan bahasa Indonesia; pendekatan horisontal Perintah dari Presiden kepada Gubernur sampai

dengan Kepala Desa (pendekatan kekuasaan) untuk mengerahkan seluruh potensi masyarakatnya: PNS, Polis, ABRI, Guru, Camat, Lurah, tokoh masyarakat, guru ngaji, dsb, untuk bergotong royong memberantas buta aksara; belajar sambil bermain dan tutor kunjung. Ketiga, pemebelajaran diintegrasikan dengan pelajaran keterampilan yang dapat diusahakan sebagai mata pencaharian atau pembelajaran fungsional; program pembelajaran juga diintegrsikan dengan program pemberantasan kemiskinan sperti program KB, keschatan, usaha kecil, koperasi, pemberdayaan perempuan/gender, dan keterampilan usaha lainnya. Keempat, prioritas di 9 provinsi yang terdapat buta aksaranya.

Kelima, penyaluran dana melalui blockgrant ke pemerintah provinsi, berbagai mitra Kementerian Pendidikan Nasional dalam memberantas buta aksara, kelompok-kelompok belajar, pengelola di desa, dsb. Keenam, pendekatan horisontal kerjasama dengan organisasi perempuan dan keagamaan seperti Aisyiah, Muslimat NU, PKK, KOWANI, Nadhatul Wathon, Alkhairot, organisasi sosial, dan organisasi pemuda. Di samping itu kerjasama juga dilakukan dengan perguruan tinggi seperti UGM, UT, dan perguruan tinggi lainnya untuk meberantas buta aksara melalui kuliah kerja nyata tematik.

Ketujuh, dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam menanggung dana dengan perbandingan pemerintah pusat dan daerah antara 50% : 50% atau 60% : 40%. Atas dasar anggaran yang ada tersebut organisasi kegamaan dan organisai kemasyarakatan lainnya sebagai mitra Kementerian Pendidikan Nasional diharapkan juga memberikan kontribusi sehingga jumlah sasaran akan

semakin besar. Kemudian beban dana yang ditanggung pemerintah daerah dibagi lagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang besarnya berkisar antara 30% : 20%.

Kedelapan, cara pemberantasannya dilakukan dengan “sistem Blok di tingkat Kecamatan”, artinya buta aksara yang ada di satu atau beberapa kecamatan di satu kabupaten diberantas sampai habis, kemudian berpindah ke kecamatan lainnya begitu seterusnya sampai buta aksara yang ada dalam satu kabupaten tuntas. Selanjutnya akan diperoleh tuntas beberapa kabupaten dalam satu provinsi. Kesembilan, meningkatkan mutu dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Keaksaraan (SKK) dan Standar Penelitian Hasil Belajar (SPHB) serta diberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) sebagai tanda selsai belajar bagi warga belajar yang telah dinyatakan lulus. Kesepuluh, tahapan pelaksanaan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Tahap Pemberantasan (*basic*), Tahap Lanjutan (*functional*) dan Tahap Mandiri (*Actvance*).

Dalam perkembangan tahun ke tahun, mulai tahun 2015 sampai saat ini Direktorat Pendidikan Masyarakat berubah nama menjadi direktorat pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Adapun program Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan adalah sebagai berikut :

- 1). Pendidikan Keaksaraan Dasar
- 2). Pendidikan Keaksaraan Lanjutan
- 3). GIM (Gerakan Indonesia Membaca)
- 4). Kampung Literasi

- 5). Sarana TBM
- 6). Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GP3M)
- 7). Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan (PKHP)
- 8). Pendataan ATS (Anak Tidak Sekolah) Program PIP
- 9). Desa Vokasi.

B. Sasaran Pendidikan Masyarakat

Mengingat sasaran pendidikan masyarakat tidak dibatasi usia, jenis kelamin, *tingkat* pendidikan, kebutuhan belajar, hal ini berarti bahwa *ysng* harus dilayani pendidikan luar sekolah mulai anak dini usia sampai dewasa/tua, tidak membedakan laki-laki, perempuan, dari mulai yang tidak berpendidikan (buta kasara) sampai dengan yang menamakan dirinya ahli, namun masih memerlukan keterampilan tertentu yang belum dikuasai dan tidak didapat dari pendidikan sekolah. Mengingat keanekaragaman kebutuhan belajar masyarakat, tidak ada pilihan, bahwa program harus beraneka ragam, dengan demikian tidak perlu ada standard kurikulum, biarkanlah berkembang sesuai perkembangan tuntutan pasar atau pemakai hasil belajar.

Pendidikan masyarakat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bergerak di bagian lapisan *terbawah* dari masyarakat. Hal ini dengan gampang dapat dilihat dan dipahami dari keadaan warga masyarakat yang mengikuti program pendidikan masyarakat, sebagian besar apabila dilihat kemampuan membiayai pendidikan dalam jangka panjang, mereka dapat dikategorikan tidak mampu, maksimal mereka hanya mampu untuk membiayai kursus. Hal ini terjadi karena mereka berasal dari keluarga yang tidak berada. Anggota masyarakat

yang mampu biasanya lebih cenderung masuk sekolah walaupun mereka juga banyak yang mengeluh bahwa pendidikan kurang berkualitas dan kurang siap menghadapi perubahan. Kurang berkualitasnya pendidikan masyarakat yang ada dewasa ini belum tentu disebabkan oleh sistem yang kurang baik, akan tetapi ada kemungkinan juga karena pengaruh masyarakat sendiri.

Dengan demikian pendidikan masyarakat harus siap melayani *seluruh* lapisan masyarakat baik yang tidak dilayani pendidikan sekolah, maupun yang sudah dilayani tetapi memerlukan tambahan pengetahuan lain yang kurang diperoleh dari sekolah. Mendengar suara masyarakat dengan keanekaragaman kebutuhan belajar, pendidikan masyarakat juga harus mampu mengantisipasi keadaan perkembangan ilmu pengetahuan dari teknologi, dan dapat menjawab kebutuhan belajar yang berkembang di masyarakat. Menyesuaikan program pendidikan masyarakat dengan kebutuhan masyarakat bukan berarti harus memperkenalkan teknologi baru tetapi juga membantu masyarakat untuk mampu menggali dan menggunakan teknologi yang sudah ada namun belum dimanfaatkan dengan baik, atau sudah dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Mengingat sasaran program yang begitu heterogen baik kebutuhan, lokasi maupun tingkat pendidikannya maka pendidikan masyarakat yang perlu dan mendesak dikembangkan dalam kerangka konsep pendidikan masyarakat yang bertumpu pada kebutuhan nyata masyarakat. Jalur pendidikan luar sekolah diperlukan agar anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, dalam rangka

memperbaiki kualitas hidup dan kehidupannya, serta menyiapkan generasi muda menyongsong hari depan yang penuh tantangan, maka sasaran pendidikan masyarakat difokuskan pada (1) anak usia dini, (2) drop out pendidikan dasar, (3) belajar sepanjang hayat, (4) buta aksara kaum perempuan, dan (5) keterampilan kejuruan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu sasaran pendidikan masyarakat di bawah ini:

1) Anak Usia Dini

Penanganan anak dilakukan sejak dini yaitu usia antara 0 sampai dengan 6 tahun, hasilnya akan optimal. Dengan perkataan lain, bila pembinaan dimulai sejak anak dilahirkan yaitu 0 tahun sampai dengan 6 tahun melalui lingkungan terdekat, melalui bermain, maka sumberdaya manusia indonesia akan lebih optimal perkembangannya dibanding dengan menerapkan wajib belajar yang dimulai pada waktu anak berusus 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Sudah banyak para ahli yang mengatakan bahwa pembentukan otak paling intensif pada tahun pertama, karena rangsangan di masa kecil dapat mengubah ukuran dan fungsi dari otak. Berdasarkan penelitian menyimpulkan bahwa antara umur 3,5 tahun dan 4,5 tahun anak lebih mudah belajar menulis, sedangkan anak yang sangat berminat untuk membaca dan menulis pada umur 4 tahun, mungkin sudah melewati masa pekanya pada saat ia masuk sekolah. Dan masa peka bagi anak untuk belajar tertib dan teratur adalah antara 2,5 tahun dan 3,5 tahun dan masa ini anak selalu menginginkan sesuatu yang rutin.

Pernyataan di atas, diperkuat oleh pendapat J. Piaget yang mengatakan bahwa rangsangan-rangsangan yang

diterima anak dari lingkungannya kan menimbulkan perubahan dalam organisasi dan fungsi struktur biologisnya. Dengan kata lain rangsangan ini akan menambah perkembangan otaknya. Struktur yang lebih fleksibel dan lebih rinci memungkinkan anak bertindak lebih cerdas dalam menghadapi lingkungannya. Berbagai informasi seperti dikemukakan di atas dapat disimpulkan betapa pentingnya pendidikan anak sejak dini karena kecerdasan anak-anak kecil sudah berkembang dengan pesat. Apa yang terjadi dalam otak selama anak tumbuh memberi bukti bahwa masa optimal untuk merangsang kemampuan dasar belajar pada anak sebagian besar terjadi sebelum anak mencapai 5 tahun atau 6 tahun, sebelum masuk sekolah dasar. Merupakan seni tersendiri bago orang tua dan pendidik untuk menyediakan rangsang dan tantangan dalam lingkungan anak yang sesuai dengan kemampuan belajar anak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran tersebut di atas kita terungat pada kenyataan bahwa garapan dan sasaran program pendidikan masyarakat sangatlah luas. Diakui bahwa pemerintah telah melakukan banyak hal untuk pengembangan kualitas anak, namun hasilnya masih belum dapat menekan angka mengulang kelas di SD, angka putus sekolah dan angka buta huruf kembali. Di sisi lain pendidikan prasekolah melalui Taman Kanak-kanak hanya mampu menampung $\pm 5,79\%$ dari jumlah seluruh anak usia prasekolah di Indonesia. Sementara Taman Kanak-kanak masih dianggap terlalu mahal serta berada di sebagian kecil daerah/kota di Indonesia. Untuk itu selain TK bisa melalui kelompok PAUD, kelompok bermain dan tempat penitipan anak trauma bagi orang tua yang sibuk bekerja di luar rumah.

Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif oleh seluruh komponen bangsa, agar generasi muda dapat berkembang secara optimal, hanya dapat terwujud apabila ada komitmen bersama untuk menetapkan satu bagian yang khusus menanganai Pendidikan Anak Dini Usia secara terpadu melalui jalur pendidikan luar sekolah. Partisipasi berbagai unsur masyarakat dengan dengan mengutamakan kemandirian masyarakat melaksanakan pengembangan anak dini usia harus direalisasikan sesegera mungkin. Pendidikan luar sekolah sangat menyadari bahwa masa depan bangsa akan ditentukan oleh sumberdaya manusia yang tangguh dan berkualitas. Untuk mendapatkan sumberdaya manusia seperti diperlukan pembinaan sedini mungkin, karena perkembangan manusia ditentukan oleh perkembangan pada usia dini tersebut, dan masa depan suatu bangsa akan sangat tergantung dari pembinaan anak sedini mungkin. Anak usia dini ini merupakan sasaran pendidikan masyarakat yang dikembangkan untuk membantu tumbuh kembang anak usia 0 tahun sampai dengan 6 tahun.

Pada sasaran pendidikan masyarakat seperti ini diberikan program pembelajaran yang dapat dikembangkan pada bagian ini antara lain: Kelompok Bermain, Penitipan Anak, Bina Keluarga dan Balita dengan pola pendidikan gembira. Anak-anak tidak diperkenalkan dengan pengetahuan yang diajarkan di sekolah, tetapi anak-anak diajak bergembira menikmati masa kanak-kanaknya. Sementara untuk orang tua yang memerlukan diberikan keterampilan untuk dapat bermatapencarian dan cara membimbing anak di rumah.



Gambar 2.4. Anak usia dini sasaran program PAUD

2) Drop Out Pendidikan Dasar

Kenyataan menunjukkan bahwa 72% tenaga kerja di Indonesia hanya berpendidikan Sekolah Dasar atau kurang. Kondisi semacam ini kurang mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi, baik sektoral maupun secara nasional. Cukup bukti bahwa semakintinggi tingkat pendidikan seseorang semakin besar peluang untuk mampu berperanserta dalam pembangunan, sebagaimana hasil studi UNESCO tahun 1998 yaitu bahwa: Pendidikan secara khusus, pendidikan dasar dapat memberikan sumbangan yang signifikan pada pengurangan kemiskinan dan perbaikan mutu kehidupan (*Education and especially basic education can make significant contribution to poverty eradication and*

enhancement of quality of life). Sampai saat ini jumlah penduduk buta huruf masih cukup tinggi, demikian pula angka drop out SD, lulus SD tidak melanjutkan dan putus SLTP.

Dalam buku UNESCO tentang Pendidikan Dasar untuk memberdayakan kemiskinan (*Basic Education for Empowerment of The poor, 1998*) mengemukakan bahwa : *"Human development is a process of enlarging peoples choice. Three essential area are for people to lead a long and healthy life, to acquire knowledge and to have access to resources needed for a decent standard of living"*. Di sini kita diingatkan bahwa pendidikan pada hakekatnya harus memberi kesempatan kepada setiap anggota agar ia memiliki banyak kesempatan kepada setiap orang agar ia memiliki banyak pilihan dalam hidupnya. Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan, yaitu (1) membantu mereka agar memiliki umur dan hidup sehat, (2) mendapatkan pengetahuan, dan (3) memiliki akses untuk mampu memenuhi standar hidupnya secara layak. Ini berarti bahwa sebenarnya pendidikan masyarakat bukanlah hanya untuk *drop out* sekolah saja; tetapi bagi mereka yang berusia di luar usia sekolah yang karena sesuatu hal belum sempat mendapatkan pendidikan dasar berhak pula untuk mendapatkan pendidikan.

Menurut para pakar psikologi dalam perkembangannya manusia memiliki kecenderungan yang relatif sama, yang secara teoritis dapat dibedakan ke dalam beberapa tahapan. Piaget dan Erickson membedakan tahap perkembangan berfikir anak menjadi 5 (lima), yaitu: (1) umur 0-2 tahun, merupakan masa pertumbuhan yang ditandai oleh kecenderungan sensoris motoris yang sangat jelas; (2) umur 2-7 tahun, yaitu masa perkembangan berfikir yang baru

memperlihatkan kecenderungan /suasana intuitif; (3) umur 7-11 tahun, yang oleh Piaget disebut masa operasi konkret; (4) umur 11-17 tahun, yang disebut masa operasi formal (sanggup berfikir logis); dan (5) umur 17 tahun ke atas yang disebut masa abstrak (Conny R Semiawan, 2002).

Perkembangan masing-masing kelompok umur tersebut berbeda-beda, dan masing-masing memerlukan bimbingan/penanganan yang tepat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perlu ada perbedaan metode pendekatan dan orientasi isi kurikulum antara pendidikan dasar yang ditujukan kepada anak usia dini sekolah dan pendidikan dasar bagi mereka yang berusia di atas usia sekolah dasar. Dengan dicanangkannya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sejak tahun 1994, pendidikan dasar jalur luar sekolah memiliki peran yang amat strategis khususnya untuk melayani warga masyarakat yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah atau drop out sekolah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberadaan pendidikan dasar jalur luar sekolah amat diperlukan. Program pendidikan dasar jalur luar sekolah dilaksanakan melalui Program Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP.

3) Buta Aksara Kaum Perempuan

Jika kita menginginkan agar setiap anak Indonesia tumbuh dan berkembang secara maksimal, fisik, emosi dan intelektualnya maka yang patut dan utama harus diperlihatkan adalah kualitas dan peranan strategis kaum perempuan sebagai insan yang akan melahirkan anak bangsa. UNESCO menyatakan bahwa mendidik wanita adalah mendidik bangsa

(Educate Woman, Educate a Nation). Hal ini masuk akal karena kaum perempuan merupakan pendidik yang pertama dan utama dalam keluarganya. Sehingga berkat jasa ibu sebagai seorang perempuan yang memberikan pendidikan awal setiap individu yang dilahirkan. Pendidikan dalam keluarga ini yang akan menjadi pondasi bagi setiap anak dalam menembangkan potensi dirinya.

Fakta menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia kaum perempuannya mencapai 50,24%. Sebagaimana besar tertinggal dan buta aksara dibandingkan dengan pria, karena perempuan, sangat terlambat memperoleh kesempatan pendidikan luar bidang kewanitaan. Berbagai masalah kaum perempuan secara nasional misalnya: jumlah perempuan yang tidak sekolah lebih besar daripada laki-laki yaitu 8% banding 4%. Jumlah perempuan buta aksara untuk 10 tahun ke atas lebih besar dibanding laki-laki, yaitu 14,92% dibanding 6,84% dan perempuan usia 45 tahun ke atas yang buta aksara mencapai 43,04%. Jumlah perempuan putus sekolah lebih besar dari pada laki-laki yaitu 16% banding 14%. Jumlah anak perempuan yang diterima dalam pendaftaran sekolah lebih kecil dibanding anak laki-laki. Makin tinggi jenjang pendidikan, makin kecil presentasi perempunnya, misalnya tingkat SMU perempuan 4% laki-laki 6%. Wanita merupakan angkatan kerja resmi dunia, tetapi dikonsentrasikan pada pekerjaan yang digaji paling rendah dan lebih mudah di PHK daripada pria, dan masih menerima kurang dari upah pria pada pekerjaan yang sama.

Ketidakadilan dalam bentuk diskriminasi di bidang pendidikan, pekerjaan, hukum, politik, kesehatan reproduksi, maupun akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan

lebih banyak menerapkan kaum perempuan. Ada dua faktor utama penyebab keterbelakangan pendidikan perempuan, yaitu (1) Faktor kemiskinan keluarga turut berperan dalam rendahnya pendidikan perempuan; (2) faktor perilaku dan budaya yang mengutamakan anak laki-laki dari pada anak perempuan. Agar perempuan dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan, khususnya dalam mewujudkan keluarga sejahtera, bahagia serta pembinaan anak, remaja dan pemuda dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pendidikan perempuan pada jalur pendidikan luar sekolah merupakan jalur yang paling tepat. Jalur ini amat tepat mengingat bentuk dan kurikulum pembelajaran yang sangat fleksibel dan berbagai program pembedayaan perempuan yang sudah teruji dan bermanfaat meningkatkan kualitas layanan perempuan dalam keluarga maupun di masyarakat.

Disamping telah tersedianya berbagai wadah organisasi perempuan yang memiliki kepedulian terhadap ketimpangan dan kesenjangan yang dialami banyak perempuan akan sangat mendukung program pendidikan luar sekolah dengan sasaran buta aksara perempuan. Pendidikan perempuan menentukan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Jenis program pendidikan yang dapat dikembangkan untuk sasaran ini antara lain: (1) program pendidikan keaksaraan fungsional, (2) program pendidikan dasar paket A setara SD dan paket B setara SLTP, (3) kursus keterampilan dan (4) program pendidikan kesehatan reproduksi.



Gambar 2.4. Pembelajaran KF

4) Belum Memiliki Keterampilan Kejuruan

Sasaran pendidikan masyarakat yang belum memiliki keterampilan dimaksudkan bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan. Di masyarakat sejak dulu hingga kini telah dikenal profesi yang disebut dengan juru, misalnya juru tik, juru foto, juru gambar, juru masak, juru mudi, juru bayar, dan lain-lainnya. Dari juru-juru tersebut dapat dipersepsikan bahwa juru mengandung arti tingkat kemampuan penguasaan suatu jenis/bidang keterampilan. Juru, berdasarkan kamus bahasa Indonesia berarti orang yang pandai di suatu pekerjaan yang memerlukan latihan, kecakapan dan keterampilan. Orang yang memiliki predikat sebagai juru oleh masyarakat dianggap mampu mengerjakan atau membuat hasil karya yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu (tenaga terampil) sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Keunggulan industri suatu bangsa dapat

dikatakan sangat ditentukan oleh kualitas tenaga terampil yang terlibat langsung dalam proses produksi. Mengingat pentingnya para juru dan orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu di masa kini dan yang akan datang, maka saat ini mulai dirancang dan dipersiapkan adanya sosialisasi melalui program pendidikan secara serius dan komprehensif, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.

Dalam konteks pendidikan masyarakat maka pendidikan yang penting perlu dirancang adalah pendidikan keterampilan kejuruan. Pendidikan kejuruan memiliki arti yang cukup bervariasi. Hal ini tergantung dari sudut pandang para perumusny. Pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan dari pada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Definisi ini mengandung pengertian bahwa setiap bidang studi adalah pendidikan kejuruan sepanjang bidang studi tersebut dipelajari lebih mendalam dari pada bidang studi lainnya dan kedalaman itu dimaksudkan sebagai bekal memasuki dunia kerja.

Definisi pendidikan kejuruan adalah program pendidikan yang secara langsung dikaitkan dengan penyiapan seseorang untuk suatu pekerjaan tertentu atau untuk persiapan tambahan karir seseorang. Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Dari ketiga definisi tersebut jelas bahwa pendidikan kejuruan pada hakekatnya adalah suatu upaya

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Belajar Orang Dewasa

Menurut Verner dan Davidson dalam Lunandi (1987), ada 6 faktor yang secara psikologis dapat menghambat keikutsertaan orang dewasa dalam suatu program pendidikan sebagai berikut.

- 1). Dengan bertambahnya usia, titik dekat penglihatan atau titik terdekat yang dapat dilihat secara jelas mulai bergerak makin jauh. Pada usia 20 tahun seseorang dapat melihat jelas pada jarak 10 cm dari matanya. Sekitar usia 40 tahun titik dekat penglihatan itu sudah menjauh sampai 23cm. Selanjutnya dnegan bertambahnya usia, titik jauh penglihatan atau titik terjauh yang dapat dilihat secara jelas mulai berkurang, yakni semakin pendek. Kedua faktor itu perlu diperhatikan dalam pengadaan dan penggunaan bahan dan alat pendidikan.
- 2). Semakin bertambah usia, semakin besar pula jumlah penerangan yang adalah suatu situasi belajar. Kalau seseorang dalam usia 20 tahun memerlukan 100 watt cahaya, pada usia 40 tahun diperlukan 145 watt, dan pada usia 70 tahun seterang 300 watt baru cukup untuk dapat melihat dengan jelas.
- 3). Semakin bertambah usia, persepsi kontras warna cenderung ke warna merah daripada spektrum. Hal ini disebabkan oleh penguningnya kornea atau lensa mata sehingga cahaya yang masuk agak terasing. Akibatnya ialah kurang dapat membedakan warna-warna lembut. Untuk jelasnya, perlu digunakan warna-warna cerah yang kontras untuk alat-alat peraga.

- 4). Pendengaran atau kemampuan menerima suara mengurang dengan bertambahnya usia. Pada umumnya seseorang mengalami kemunduran dalam kemampuannya membedakan nada secara tajam pada tiap dasawarsa dalam hidupnya. Pria cenderung lebih cepat mundur dalam hal ini daripada wanita. Hanya 11% dari orang berusia 70 tahun ditemukan mengalami kurang pendengaran.
- 5). Pembedaan bunyi atau kemampuan untuk membedakan bunyi semakin mengurang dengan bertambahnya usia. Dengan demikian, orang lain yang berbicara terlalu cepat, semakin sukar ditangkap dan bunyi sampingan serta suara dilatar belakangnya bagai menyapu dengan suara orang yang berbicara. Semakin sukar pula membedakan bunyi konsonan seperti t, g, b, c, dan d.

Berdasarkan karakteristik orang dewasa sebagai peserta belajar dan faktor-faktor yang memengaruhi belajar orang dewasa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan situasi belajar dan sikap orang dewasa. Beberapa hal yang patut diperhatikan sebagaimana dibawah ini.

- 1). Terciptanya proses belajar adalah suatu proses pengalaman yang ingin diwujudkan oleh setiap individu orang dewasa. Proses pembelajaran orang dewasa berkewajiban memotivasi / mendorong untuk mencari pengetahuan yang lebih tinggi.
- 2). Setiap individu orang dewasa dapat belajar secara efektif bila setiap individu mampu menemukan makna pribadi bagi dirinya dan memandang makna yang baik itu berhubungan dengan keperluan pribadinya.

F. Asumsi Pokok Pendidikan Orang Dewasa

Malcolm Knowles (1970) dalam mengembangkan konsep pendidikan orang dewasa ada empat pokok asumsi sebagai berikut.

- 1). Konsep diri. Asumsinya kesungguhan dan kematangan diri seseorang bergerak dari ketergantungan total (realitas pada bayi) menuju ke arah pengembangan diri sehingga mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dan mandiri. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa secara umum konsep diri anak-anak masih bergantung, sedangkan pada orang dewasa konsep dirinya sudah mandiri. Karena kemandirian inilah orang dewasa memperoleh penghargaan orang lain sebagai manusia yang mampu menentukan dirinya sendiri (self-determination) dan mampu mengarahkan dirinya sendiri (self-direction). Apabila orang dewasa tidak menemukan dan menghadapi situasi dan kondisi yang memungkinkan timbulnya penentuan diri sendiri dalam suatu pelatihan, akan menimbulkan penolakan atau reaksi yang kurang menyenangkan. Orang dewasa juga mempunyai kebutuhan psikologis yang dalam agar secara umum menjadi mandiri, meskipun dalam situasi tertentu boleh jadi ada kebergantungan yang sifatnya sementara. Hal ini menimbulkan implikasi dalam pelaksanaan praktik pelatihan, khususnya yang berkaitan dengan iklim dan suasana pembelajaran dan diagnosis kebutuhan serta proses perencanaan pelatihan.
- 2). Peranan Pengalaman. Asumsinya adalah sesuai dengan perjalanan waktu seorang individu tumbuh dan berkembang menuju ke arah kematangan. Dalam

perjalanannya, seorang individu mengalami dan mengumpulkan berbagai pengalaman pahit-getirnya kehidupan, dimana hal tersebut menjadi sumber belajar yang demikian kaya. Selain itu, pada saat yang bersamaan individu tersebut memberikan dasar yang luas untuk belajar dan memperoleh pengalaman baru. Oleh sebab itu, dalam teknologi pelatihan atau pembelajaran orang dewasa terjadi penurunan penggunaan teknik transminal seperti yang dipergunakan dalam pelatihan konvensional menjadi lebih mengembangkan teknik yang bertumpu pada pengalaman. Dalam hal ini dikenal dengan *Experiential Learning Cycle* (proses belajar berdasarkan pengalaman). Hal ini menimbulkan implikasi terhadap pemilihan dan penggunaan metode dan teknik kepelatihan. Maka, dalam praktik pelatihan lebih banyak menggunakan diskusi kelompok, curah pendapat, kerja laborator, sekolah lapang, melakukan praktik, dan lain sebagainya. Semua pada dasarnya berupaya untuk melibatkan peran atau partisipasi peserta pelatihan.

- 3). Kesiapan belajar. Asumsinya setiap individu semakin matang sesuai dengan perjalanan waktu, maka kesiapan belajar bukan ditentukan oleh kebutuhan atau paksaan akademik ataupun biologisnya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh tuntutan perkembangan dan perubahan tugas dan peranan sosialnya. Pada seorang anak, ia belajar karena ada tuntutan akademik atau biologinya. Namun, pada orang dewasa siap belajar sesuatu karena tingkatan perkembangan mereka yang harus menghadapi dalam peranannya sebagai pekerja, orangtua, atau pemimpin organisasi. Hal ini membawa implikasi

terhadap materi pembelajaran dalam suatu pelatihan tertentu. Dalam hal ini, tentunya materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan peranan sosialnya.

- 4). Orientasi belajar. Asumsinya adalah pada anak orientasi belajarnya sekolah-olah sudah ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang berpusat pada materi pembelajaran (subject matter centered orientation). Sementara pada orang dewasa mempunyai kecenderungan memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi (problem centered orientation). Hal ini dikarenakan belajar bagi orang dewasa sekolah-olah merupakan kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, terutama dalam kaitannya dengan fungsi dan peranan sosial orang dewasa. Selain itu, perbedaan asumsi ini disebabkan adanya perbedaan perspektif waktu. Bagi orang dewasa, belajar lebih bersifat untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam waktu segera. Sementara anak, penerapan apa yang dipelajari masih menunggu waktu sampai dia lulus dan sebagainya. Dengan demikian, ada kecenderungan pada anak bahwa belajar hanya sekedar untuk dapat lulus ujian dan memperoleh sekolah yang lebih tinggi. Hal ini berimplikasi terhadap sifat materi pembelajaran atau pelatihan bagi orang dewasa, yaitu materi tersebut hendaknya bersifat praktis dan dapat segera diterapkan didalam kenyataan sehari-hari.

Untuk membedakan antara andragogi dengan pedagogi berdasarkan asumsi pokok pendidikan orang dewasa dapat dipahami dalam tabel berikut.

Tabel Perbandingan Asumsi dan Modal Pedagogi dan Andragogi

No	Asumsi	Pedagogik	Andragogi
1	Konsep tentang diri peserta didik	Peserta didik digambarkan sebagai seseorang yang bersifat tergantung. Masyarakat mengharapkan para guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan apa yang harus dipelajari, kapan, bagaimana cara mempelajarinya, dan apa hasil yang diharapkan setelah selesai.	Suatu hal wajar apabila dalam suatu proses pendewasaan, seseorang akan berubah dari bersifat tergantung menuju ke arah yang memiliki kemampuan yang mengarahkan diri sendiri. Namun, setiap individu memiliki irama yang berbeda-beda dan juga

			<p>dalam dimensi kehidupan yang berbeda-beda pula. Para buruh bertanggung jawab untuk menggalakan dan memelihara kelangsungan perubahan tersebut. Pada umumnya, orang dewasa secara psikologis lebih memerlukan penghargaan diri, walaupun dalam keadaan tertentu mereka bersifat tergantung.</p>
2	Fungsi	Disini pengalaman yang	Disini ada

<p>pengalaman peserta didik</p>	<p>dimiliki oleh peserta didik tidak besar nilainya, mungkin hanya berguna untuk titik awal. Sementara pengalaman yang sangat besar manfaatnya adalah pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari gurunya, para penulis produsen alat-alat peraga atau alat-alat audio visual dan pengalaman ahli lainnya. Oleh karenanya, teknik utama dalam pendidikan adalah teknik penyampaian yang berupa: ceramah, tugas baca, dan penyajian melalui alat pandang dengar.</p>	<p>anggapan bahwa dalam perkembangannya seseorang membuat semacam alat penampungan (reservoir) pengalaman yang kemudian akan merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Lagipula seseorang akan menganggap arti dengan lebih baik tentang apa yang dialami daripada diperoleh secara pasif.</p>
---------------------------------	---	---

			Oleh karena itu, teknik penyampaian yang utama adalah eksperimen, percobaan di laboratorium, diskusi, pemecahan masalah, latihan simulasi, dan praktek lapangan.
3	Kesiapan Belajar	Seseorang harus siap mempelajari apapun yang dikatakan oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan tekanan yang cukup besar bagi mereka karena adanya perasaan takut gagal. Anak-anak yang sebaya dianggap siap untuk mempelajari hal yang sama pula. Oleh karena itu, kegiatan belajar harus diorganisasikan dalam suatu kurikulum yang baku, dan langkah-langkah penyajian harus sama bagi semua orang.	Seseorang akan siap mempelajari sesuatu apabila ia merasa perlu melakukan hal tersebut, karena dengan mempelajari sesuatu itu ia dapat memecahkan masalahnya atau dapat menyelesaikan tugas

			<p> sehari-hari dengan baik. Fungsi pendidik disini adalah menciptakan kondisi, menyiapkan alat serta prosedur untuk membantu mereka menemukan apa yang perlu mereka ketahu. Dengan demikian, program belajar harus disusun sesuai dengan kebutuhan kehidupan mereka yang sebenarnya dengan urutan-urutan penyajian harus disesuaikan </p>
--	--	--	--

			dengan kesiapan peserta didik.
4	Orientasi belajar	<p>Peserta didik menyadari bahwa pendidikan adalah suatu proses penyampaian ilmu pengetahuan, dan mereka memahami bahwa ilmu-ilmu tersebut baru akan bermanfaat dikemudian hari. Oleh karena itu, kurikulum harus disesuaikan dengan unit-unit mata pelajaran dan mengikuti urutan-urutan logis ilmu tersebut, misalnya dari dulu ke modern, atau dari yang mudah ke sulit, dengan demikian orientasi belajar dari ke mata pelajaran. Artinya, jadwal disusun berdasarkan terselesainya mata-mata pelajaran yang telah ditetapkan.</p>	<p>Peserta didik menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu proses peningkatan pengembangan kemampuan diri untuk mengembangkan potensi yang maksimal dalam hidupnya mereka ingin mampu menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperolehnya hari ini untuk mencapai kehidupan yang lebih baik atau</p>

			<p>yang lebih efektif untuk hari esok. Belajar harus disusun kearah pengelompokan pengembangan kemampuan. Dengan demikian, orientasi belajar terpusat kepada kegiatannya. Dengan kata lain, cara menyusun pelajaran berdasarkan kemampuan-kemampuan apa atau penampilan yang bagaimana yang diharapkan ada pada peserta didik.</p>
--	--	--	--

4. Asumsi Peserta Didik dalam Andragogi

Beberapa asumsi mengenai peserta didik sebagai berikut (Knowles, 1984:12). Adalah :

- 1). Kebutuhan untuk mengetahui (the need to know). Peserta didik diasumsikan hanya butuh mengetahui tentang segala sesuatu yang diajarkan guru mereka menginginkan kelulusan dari mendapatkan peningkatan.
- 2). Konsep diri peserta didik. Konsep guru mengenai peserta didik bergantung pada kepribadian. Oleh karena itu, konsep diri peserta didik bergantung pada kepribadiannya tersebut.
- 3). Peran pengalaman belajar. Pengalaman peserta didik merupakan sumber belajar sehingga teknik pemindahan informasi merupakan yang paling dominan dalam pendekatan pedagogik.
- 4). Kesiapan untuk belajar

Ada beberapa prinsip belajar yang perlu dianut dalam pembelajaran yang bersifat andragogik sebagaimana dikemukakan oleh Zaenuddin Arief (1986:810) sebagai berikut:

Tabel 4.1

Kondisi Belajar dan Prinsip Mengajar yang Bersifat Andragogik

Kondisi Belajar	Prinsip-prinsip Mengajar
Peserta merasa ada kebutuhan untuk belajar	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitator mengemukakan kepada peserta kemungkinan-kemungkinan yang baru untuk pemenuhan dirinya.2. Fasilitator membantu setiap peserta untuk memperjelas

	<p>aspirasi dirinya untuk peningkatan perilaku</p> <p>3. Fasilitator membantu peserta mendiagnosis perbedaan antara aspirasi dengan tingkat penampilannya sekarang.</p> <p>4. Fasilitator membantu peserta mengidentifikasi masalah-masalah kehidupan yang mereka alami karena adanya perbedaan tadi.</p>
<p>Lingkungan belajar ditandai oleh keadaan fisik yang menyenangkan, saling menghormati dan mempercayai, saling membantu, kebebasan mengemukakan pendapatnya dan setuju adanya perbedaan.</p>	<p>1. Fasilitator memberikan kondisi fisik yang menyenangkan seperti tempat duduk, lampu, dll. Yang kondusif untuk saling interaksi satu sama lain.</p> <p>2. Fasilitator memandang setiap peserta merupakan pribadi yang bermanfaat dan menghormati perasaan dan gagasan-gagasannya.</p> <p>3. Fasilitator membangun hubungan saling membantu antara peserta dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat kooperatif dan mencegah adanya persaingan dan saling membenikan penilaian</p>
<p>Peserta memandang tujuan</p>	<p>1. Fasilitator melibatkan peserta dalam suatu proses mer-umuskan</p>

pengalaman belajar menjadi tujuan mereka sendiri	tujuan belajar dimana kebutuhan peserta, lembaga, pengajar dan masyarakat ikut dipertimbangkan
Peserta dapat menyetujui untuk saling urun tanggung jawab dan dalam perencanaan dan melaksanakan pengalaman belajar bersama, dan karenanya mereka mempunyai rasa memiliki terhadap hal tersebut.	1. Fasilitator ikut turun pula dalam merancang pengalaman belajar dan memilih bahan-bahan dan metode melibatkan peserta dalam setiap keputusan
Peserta berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar	1. Fasilitator membantu peserta mengorganisasi dirinya (kelompok untuk melakukan proyek, tim belajar mengajar, studi bebas dll) untuk urun tanggung jawab dalam proses pencarian bersama
Proses belajar dikaitkan dan menggunakan pengalaman peserta	1. Fasilitator membantu peserta menggunakan pengalaman mereka sendiri sebagai sumber belajar melalui penggunaan teknik seperti diskusi, permainan peran, kasus.

	2. Fasilitator membantu peserta untuk mengaplikasikan belajar baru terhadap pengalaman mereka, dan ini berarti membuat belajar lebih bermakna dan terpadu
Peserta mempunyai rasa kemajuan terhadap tujuan belajar mereka	1. Fasilitator melibatkan peserta dalam mengembangkan kriteria untuk mengukur keberhasilan 2. Fasilitator membantu peserta mengembangkan dan mengaplikasikan prosedur dalam mengevaluasi diri sendiri berdasarkan kriteria itu

Sedangkan beberapa prinsip pendidikan orang dewasa (Knowles dalam Drysdale (1998) adalah sebagai berikut :

- 1) Orang dewasa harus punya keinginan untuk belajar, orang dewasa tidak akan mempelajari sesuatu hanya karena seseorang mengatakan mereka seharusnya belajar, tetapi mereka harus memiliki keinginan untuk mempelajari keterampilan atau pengetahuan baru.
- 2) Orang dewasa mau belajar kalau merasa perlu, mereka ingin tahu sejauh mana pelatihan itu dapat membantu mereka sesegera mungkin, mereka tidak tertarik pada sesuatu yang mungkin bernilai 10 tahun kemudian. Orang dewasa tidak akan tertarik pada pelatihan yang mengajarkan banyak teori-teori, mereka tertarik sekali

pada hal-hal praktis, sederhana dan langsung memenuhi apa yang mereka inginkan dalam belajar.

- 3) Orang dewasa belajar sambil bekerja, (*Adult learn by doing*), penelitian menunjukkan bahwa bila orang dewasa segera dapat mempraktekkan hasil pelatihan dan menggunakan hasil belajarnya bertahan lebih lama, tetapi apabila mereka tidak mempunyai kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam belajar dan segera mempraktekkan hasilnya maka mereka akan lupa apa yang telah mereka pelajari.
- 4) Orang dewasa belajar dengan memecahkan masalah-masalah realistik, jika masalah-masalah yang mereka pelajari tidak realistik, tidak ada hubungannya dengan kehidupan nyata, mereka, tidak akan tertarik.
- 5) Pengalaman mempengaruhi belajar orang dewasa, mereka akan menghubungkan apa yang dipelajari dengan apa yang sudah mereka ketahui. Jika pengetahuan baru tidak cocok dengan pengetahuan mereka sebelumnya, mereka akan menolaknya. Dasar belajar orang dewasa adalah pengalaman mereka, suatu pengalaman atau informasi baru harus dihubungkan dengan apa yang telah mereka ketahui.
- 6) Orang dewasa belajar dengan sangat baik dalam suasana lingkungan informal, suasana klasikal umumnya kurang mereka sukai.
- 7) Orang dewasa merespons metode pelatihan yang bervariasi, mereka akan belajar lebih baik melalui cara yang bervariasi, atau dengan kata lain bahwa informasi sampai pada mereka melalui lebih dari satu indera.

- 8) Orang dewasa menginginkan bimbingan, bukan nilai atau ranking-ranking, orang dewasa mengerjakan apa yang mereka ingin ketahui, seberapa jauh mereka bisa dan kemajuan apa yang telah mereka buat dengan belajar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Zainuddin. 1987. *Andragogy*. Bandung: Angkasa.
- Budiono, Sutrisno. 2009. *Model Kursus Para Profesi Terpadu*. Surabaya: Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal. BPPNFI Regional 4.
- Depdiknas. Profil Direktorat Pendidikan Masyarakat, Ditjen. PNFI Depdiknas, 2006.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *SISDIKNAS*, 2006. Bandung: Fokus Media.
- Undang-undang Republik Inonesia 14 Tahun 2007 tentang *kursus*.
- Undang-Undang Dasar dan Penjelasanannya Tahun 1945.
- Hatimah, Ihat. 2004. *Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Potensi Lokal di PKBM*. (<http://jurnal.upi.edu/mimbar-pendidikan/view/345/pengelolaanpembelajaran-berbasis-potensi-lokal-di-pkbm.html>) diakses tgl 1 juli 2011.
- Hamid Muhammad, Pendidikan Masyarakat untuk Pemberdayaan, Direktorat Pendidikan Masyarakat. Dirjen PNFI, Depdiknas, 2008.
- Joesof, Soelaiman. 1992. *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudiapermana, Elih 2012. *Pendidikan Keluarga : Sumberdaya Pendidikan Sepanjang Hayat*. Bandung. EDUKASIA Press.
- Kamil Mustofa. 2009. *Pendidikan Nonformal pengembangan melalui pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) di*
Edisi Revisi Pendidikan Masyarakat | 201

Indonesia (sebuah pembelajaran dari kominkan Jepang). Bandung. Alfabeta.

Kindervater, S. (1979). *National Education as An Empowering Process*. Massachusetts: Center for International Education University of Massachusetts.

Knowles, Malcolm. 1980. *The Modern Practice of Adult Education*. Chicago: Follett Publishing Company.

Soeprijanto, dkk. Pendidikan Masyarakat dari masa ke masa. 2011. Jakarta. UNJ Press.

Santoso, Slamet, 2010. Konsep Dasar PLS. bahan kuliah Konsep Dasar PLS. Tidak diterbitkan.

Suryadi Ace. 2009. Mewujudkan Masyarakat Gemar Belajar dalam Konsep Pemberdayaan. Aksara Press.

Santoso, Pendidikan Masyarakat, Ganaco, Bandung, 1956.

Marzuki, Saleh. 2010. *Pendidikan Nonformal Dimensi dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan dan Andragogi*. Malang: Remaja Rosdakarya.

Maslow, Abraham, H. 1970. *Motivation and Personality*. New York: Harper and Row Publisher

-----, Pendidikan Non Formal Bukan Residu, FIP Universitas Negeri Malang, 2009.

Sudjana, S, 1989. Pendidikan Non Formal (Wawasan, sejarah dan azas). Bandung.

Sudjana, S, 2004. Pendidikan Nonformal: *Wawasan, sejarah perkembangan, filsafat dan teori pendukung*, serta azas. Bandung: Falah Production.

Srinivasan, Lyra. 1977. *Persepctive Non Formal Adult Learning. Functional Education for Individual, community and Natioal Development*. New York: The Van Dycle Printing Company

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Tentang Dasar Karang Taruna